

**REKONSTRUKSI PERJANJIAN *GALA* (GADAI ADAT) PADA MASYARAKAT ADAT ACEH BERDASARKAN PERSPEKTIF SYARIAH**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro

**OLEH:**

**MUHAMMAD IQBAL**

**NIM: 11010115410056**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SUKIRNO. S.H., M.Si.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2017**

HALAMAN PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI PERJANJIAN *GALA* (GADAI ADAT) PADA MASYARAKAT ADAT ACEH BERBASIS SYARIAH**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Program Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

MUHAMMAD IQBAL

11010115410079

Pembimbing,

( Dr. Sukirno, S.H., M.Si. )

NIP. 196409241990011001

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

(Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.)

NIP. 197002021994041001

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Tesis ini Diajukan Oleh:**

Nama : Muhammad Iqbal

NIM : 11010115410056

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Rekonstruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada

 Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah

**Telah Diuji dan Berhasil Dipertahankan di Hadapan Dosen Penguji**

**Pada Hari Kamis Tanggal 23 Maret 2017**

**Dewan Penguji**

Pembimbing : Dr. Sukirno, S.H., M.Si. (....................)

Penguji I : Prof. Dr. H. Achmad Busro, S.H., M.Hum. (....................)

Penguji II : Ro'fah Setyowati, S.H., M.Hum., Ph.D. (....................)

**Ditetapkan di Semarang.**

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, Muhammad Iqbal, S.H. menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah dan Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 13 Maret 2017

Penulis,

(MUHAMMAD IQBAL)

 NIM: 11010115410056

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Motto:**

**“Miseu ka taböh bungköh beuneung,**

**Beu tateumeung bungköh sutra”.**

**(Hadih Maja)**

**“Mate Aneuk Meupat Jeurat,**

**Gadoh Adat Pat Tamita”.**

**(Hadih Maja)**

**Kupersembahkan Karya Ini Untuk:**

**Kedua Orang Tuaku**

**Abang dan Adik-Adikku, Serta**

**Almamaterku Universitas Diponegoro**

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya atas anugerah yang tidak terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan. Shalawah beriringkan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis dengan judul ”Rekonstrusi Perjanjian *Gala* (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh berbasis Syariah” tidak sedikit kesulitan yang dihadapi penulis, baik dari segi penulisan dari awal sampai dengan akhir dan proses pengumpulan data di lapangan. Sehingga atas bantuan dari semua pihak baik moril spritual maupun materil sangat berharga hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu sudah sepatutnya Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ucapan terima kasih, disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang beserta Pembantu Rektor.
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang beserta Pembantu Dekan.
3. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum, Selaku Sekretaris Bidang Akademik Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Bidang Keuangan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Dr. Sukirno, S.H., M.Si, selaku dosen Pembimbing yang dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan Tesis ini.
7. Dewan Penguji diantaranya Bapak Prof. Dr. H. Achmad Busro, S.H., M.Hum. dan Ibu Ro’fah Setyowati, S.H., M.Hum., Ph.D..
8. Segenap dosen-dosen Magister Ilmu Hukum Undip yang telah ikhlas memberikan banyak ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan pengetahuaan yang bermanfaat dalam kehidupan.
9. Segenap Staf Akademik dan Perpustakaan Magister Ilmu Hukum Undip.
10. Bapak H. Badruzzaman Ismail, S.H., M.Hum selaku ketua Majelis Adat Aceh yang telah membantu penulis selama penelitian.
11. Teungku H. Faisal Ali selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang telah membantu penulis selama penelitian.
12. Drs. Armia selaku Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya yang telah membantu penulis selama penelitian.
13. Bapak Sulaiman A. Latief selaku Imum Mukim Kemukiman Kuta Reuntang yang telah membantu penulis selama penelitian.
14. Bapak Sulaiman, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Teuku Muttaqin Mansur, S.Ag., M.H. selaku Dosen Universitas Syiah kuala, Banda Aceh yang turut membantu baik moril maupun materil yang telah memberikan berbagai masukan selama penelitian.
15. Ayahanda Drs. H. Adnan. A.R., Ibunda Hj. Idarwati. S.Pd serta abangku Darmai Saputra dan adik-adikku Muhammad Khalil dan Ulul Azmi yang tiada henti-hentinya mengasuh dan membimbing penulis dengan segala kasih sayangnya serta selalu berjuang tanpa kenal lelah memberikan yang terbaik untuk penulis berupa doa dan dukungan baik moral maupun materi.
16. Sahabatku Ushawatul Hasanah. S.Pd. yang turut membantu baik moril maupun materil.
17. Keluarga besar Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Konsentrasi Hukum Ekonomi dan Teknologi (HET) Angkatan 2015, A. Hashfi Luthfi, M Alfaruq Nirwana, Agung Darmawan, Rahandy Rizki Prananda, Rokhi Maghfur, Reynold Widiatmoko, Erwin Syahputra, Pak Sihnomo, Ika Wahyuningtyas, Kanita Agustin, Delta Ega Wasalis, Ralyta Hero Prasapta, Offi Jayanti, Mb sulistyowati, juga seluruh teman-teman angkatan 2015 Magister Ilmu Hukum UNDIP, terimaksih telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka selama ini.
18. Teman-Teman Fakultas Hukum Unsyiah Angkatan 2010 dan sahabat-sahabat terbaik Jeumala Amal Angkatan 2010 yang telah memberikan semangat.
19. Semua pihak yang telah membantu dengan sukarela yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan dari segi penulisan maupun isinya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran danri semua pihak demi perbaikan tesis ini dikemudian hari. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahun dan bagi praktisi pemberdayaan masyarakat adat di Aceh, baik itu bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, Majelis Permusyawaratan Ulama maupun Pemerintah di Aceh. Akhirnya semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

Semarang, 13 Maret 2017

MUHAMMAD IQBAL

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR SKEMA xiii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR ISTILAH xv

ABSTRAK xvi

ABSTRACT xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 6
3. Tujuan Penelitian 7
4. Manfaat Penelitian 7
5. Manfaat Teoritis 7
6. Manfaat Praktis 7
7. Kerangka Pemikiran 8

Kerangka Konseptual 8

1. Metodologi Penelitian 12
2. Lokasi Penelitian 12
3. Pendekatan Penelitian 13
4. Spesifikasi Penelitian 13
5. Jenis Data 13
6. Metode Pengumpulan Data 14
7. Metode Analisis Dan Validasi Data 15
8. Sistematika Penulisan 17

BAB II KAJIAN PUSTAKA 18

1. Pengertian Hukum Adat Dan Masyarakat Adat 18
2. Hukum Adat 18
3. Masyarakat Hukum Adat 21
4. Mukim Dalam Masyarakat Adat Aceh 26
5. Pengertian Perjanjian Menurut Hukum Adat 28
6. Pengertian Perjanjian Gadai 30
7. Obyek Gadai 32
8. Hak dan Kewajiban Bagi Pihak Pemberi Dan Penerima Gadai 33
9. Berakhirnya Waktu Gadai 37
10. Gadai Dalam Aspek Syariah 41
11. Dasar Hukum Gadai Syariah 43
12. Rukun dan Syarat Sah Perjanjian Gadai 47
13. Pemanfaatan Barang Gadai 53
14. Berakhirnya Akad Gadai (rahn) 57
15. Teori Berlakunya Hukum Di Indonesia 59

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 64
2. Gambaran Umum Kabupaten Pidie Jaya, Aceh 64
3. Lokasi Penelitian 66
4. Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Gala Dalam Masyarakat Adat

Aceh 69

1. Sejarah Perjanjian Gala dalam Masyarakat Adat Aceh 69
2. Unsur-Unsur dalam Perjanjian Gala 73
3. Asas-Asas Dalam Perjanjian Gala 76
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Gala 79
5. Berakhirnya Perjanjian Gala Dalam Masyarakat Adat Aceh 82
6. Proses Penyelesaian Sengketa Gala Dalam Masyarakat Adat

Aceh 84

1. Kaitan Antara Perjanjian Gala dengan Gadai Syariah 91
2. Konsep Perjanjian Gadai Dan Gadai Syariah 91
3. Batasan Waktu Dan Penguasaan Objek Gala Ditinjau Dari Aspek Perekonomian Islam 92
4. Bentuk Rekontruksi Perjanjian Gala Berdasarkan Perspektif Syariah 99

Penerapan Akad Mudharabah Dalam Perjanjian Gala 102

BAB IV PENUTUP 109

1. Kesimpulan 109
2. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA 112

**DAFTAR GAMBAR**

1. Peta letak Kabupaten Pidie Jaya 64
2. Peta Administrasi Kabupaten Pidie Jaya 65
3. Tata Letak Peradilan Adat Gampong 87

**DAFTAR SKEMA**

Mekanisme Pembiayaan Gala dengan Konsep Mudharabah 105

**DAFTAR TABEL**

1. Nama Kecamatan, Jumlah Gampong, Kemukiman dan Luas

Wilayah Kabupaten Pidie jaya 66

1. Perbedaan Perjanjian *Gala* dan Perjanjian *Gala* berbasis Syariah 107

**DAFTAR ISTILAH**

Aparatur Gampong terdiri unsur pemerintahan Gampong yang terdiri dari *keuchik,* sekretaris gampong, beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Imum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di Gampong yang berkenan dengan agama Islam dan pelaksanaan syariat Islam.

Imum Mukim adalah kepala pemerintahan mukim.

Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.

Naleh adalah sebutan untuk luas tanah sawah yang luas 2500 m2.

Peusijuek adalah upacara tepung tawar

*Qanun* merupakan sebutan khusus Peraturan Daerah di Aceh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Tuha peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong.

**ABSTRAK**

*Gala* merupakan suatu perjanjian pinjam-meminjam antara pihak pemberi *gala* dan penerima *gala* dengan konsep tolong-menolong pada untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam keadaan yang bersifat mendesak. Jika melihat pelaksanaan perjanjian *gala* pada masyarakat adat Aceh saat ini adanya ketidak sesuaian antara pelaksanaan dan aturan pada Pasal 2 (dua) ayat (2) *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008 tentang Adat dan Istiadat dan ketentuan Pasal 7 Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perjanjian *gala* dalam masyarakat adat Aceh. Untuk mengetahui konsep perjanjian *gala* berdasarkan perspektif syariah dan untuk mengetahui bentuk rekonstruksi perjanjian *gala* berbasis syariah.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan *yuridis empiris* dengan spesifikasi pendekatan *socio-legal research*. Selain data sekunder, juga digunakan data primer dari serangkaian observasi dan wawancara dengan informan.

Bentuk pelaksanaan perjanjian *gala* padamasyarakat adat Aceh adalah jika para pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian *gala,* maka terjadilah serah terima *(ijab kabul)* yang disertai penyerahan objek jaminan dari pihak pemberi *gala* kepada pihak penerima *gala* dalam bentuk hak pakai, sedangkan dipihak penerima *gala* menyerahkan uang dengan kesepakatan yang dipenuhi sebagaimana telah diperjanjikan antara keduanya dalam bentuk tunai*.* Berakhirnya perjanjian *gala* pada masyarakat adat Aceh adalah jika objek *gala* tersebut telah ditebus. Jika ditinjau konsep perjanjian *gala* dari perspektif syariah maka adanya ketidaksesuaian diantara keduanya. Pada suatu perjanjian *gala* tidak mengenal adanya batas waktu berakhirnya perjanjian *gala* dan hasil yang diperoleh atas pemanfaatan objek gala dianggap sebagai suatu bentuk balas jasa dari pihak pemberi *gala* atas pinjaman dari pihak penerima *gala* tanpa mengurangi hutang pihak pemberi *gala.,* sedangkan pada perspektif syariah tidak adanya batasan waktu atas pemanfaatan atas objek *gala* akan menjuruskan perjanjian gala ke dalam perbuatan *gharah* dan *riba*. Salah satu bentuk rekontruksi perjanjian *gala* berbasis syariah yaitu dengan adanya penerapan akad *mudharabah* sehingga pemanfaatan atas barang *gala* dapat terhindar dari unsur *gharar* dan riba. Diharapkan kepada para pihak dalam melaksanakan perjanjian *gala* agar tidak melupakan konsep awal perjanjian *gala* yangmerupakan suatu perbuatan tolong-menolong dan tidak mengharapkan keuntungan. Pelaksanaan perjanjian *gala* pada masyarakat adat di Aceh sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah dan mengacu pada Pasal 2 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Adat dan Istiadat yang menyebutkan “Pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan adat istiadat haruslah berpedoman pada nilai-nilai Islami” sehingga dalam pelaksanaan perjanjian *gala* serta tidak menjerumuskan para pihak dalam perjanjian *gala* dalam praktek *gharar* dan riba. Dan diharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk membuat *qanun* khusus tentang tata cara pelaksanaan *gala* yang sesuai dengan ketentuan Islam.

**Kata Kunci: Perjanjian Gala, Masyarakat Adat Aceh, Berbasis Syariah.**

**ABSTRACT**

*Gala* is a loan agreements between the donor and recepient with the concept of mutual help to meet the financial needs in an urgent. If you look at the implementation of *gala* agreement in Aceh culture society nowaday the discrepancy between implementation and the rules in Article 2 (two) of clause (2) Qanun number 9 of 2008 about traditions and customs, and the provisions of Article 7 of Government Regulation number 56 of 1960 about size determination of farmland. The purpose of this study was to determine. To know the implementation of *gala* agreement in Aceh culture society. To know the concept gala agreement based on sharia perspective To know reconstruction of gala agreement based on sharia.

The method used is empirical juridical approach and socio-legal approach. In addition to secondary data, also used primary data from a series of observations and interviews with informants.

Form of implementation of the agreement gala on indigenous peoples of Aceh is if the parties have agreed to enter into agreements gala, then there was a handover (consent granted) that accompanied the delivery of security object from the donor gala to the recipient 'gala in the form of a right to use, while the part of the recipient gala surrender money with the deal met as has been agreed between them in cash. Expiry of the gala on indigenous peoples gala Aceh is if the object has been redeemed. If viewed from the perspective of the concept of sharia gala agreement that the discrepancies between the two. In an agreement gala recognizes no deadline for expiry of the gala and the results obtained on the use of the object gala is considered as a form of remuneration from the donor gala on loan from the receiving party gala without reducing debt the provider gala., While the perspectives of sharia absence a time limit on the use of the object gala gala will aim agreement into action gharah and usury. One form of sharia-based reconstruction gala agreement that with the implementation of mudharabah so that the use of the goods gala can avoid gharar and usury. It is expected that the parties in implementing the agreement in order not to forget the gala initial concept gala agreement which is an act of mutual help and does not expect profit. Implementation of the indigenous peoples gala agreement in Aceh should be implemented in accordance with the provisions of sharia and referring to Article 2 Qanun No. 9 of 2008 concerning Indigenous and Customs which states "Development, development, conservation, and protection and customs must be guided by the values Islamic values ​​"that the implementation of the agreement does not plunge the gala as well as the parties to the agreement gala in practice gharar and usury. And is expected to the Aceh Government to make special qanuns on procedures for the gala in accordance with the provisions of Islam.

**Keywords: Agreement Gala, Aceh Culture Society, Sharia.**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Hukum adat (*adat recht)* merupakan terjemahan dari bahasa Belanda*.* Kata *adat recht* pertama kali diperkenalkan oleh C. Snouck Hurgronje di dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers,* menurutnya hukum adat sebagai *adat recht* yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial *(social control)* yang hidup di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Istilah *adat recht* selanjutanya terus dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven yang menurutnya hukum adat merupakan *nomenklatur* (penamaan) yang menunjukkan sebagai suatu sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh penjuru nusantara.[[1]](#footnote-1)

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan suatu aneka ragam suku budaya dan bangsa. Bila diperhatikan pada tiap wilayahnya memiliki berbagai pola adat dan sangat bervariasi. Hampir setiap wilayah yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki hukum adat tersendiri yang telah terbentuk sangat lama, bahkan sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyatakan kemerdekaannya.

Berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor 1/Misi/1959 yang berlaku pada tanggal 25 Mei 1959 Aceh merupakan salah satu daerah istimewa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengakuan keistimewaan Aceh didasarkan pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia yang menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Ketahanan dan daya juang tinggi ini bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam, adapun hal yang menjadi perhatian utama adalah pada bidang keagamaan, peradatan dan pendidikan.[[2]](#footnote-2)

Masyarakat adat Aceh dalam tatanan sosial masih menjunjung tinggi dan menjaga nilai-nilai adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti pada kehidupan masyarakat Aceh dimasa-masa yang lalu telah adanya praktik-praktik kehidupan yang mengarah pada aspek kehidupan modern yang salah satunya adalah praktik ekonomi. Adapun salah satu kegiatan ekonomi yang masih dipraktikkan dari generasi ke generasi secara turun-menurun dalam kehidupan masyarakat adat Aceh adalah *gala* (gadai adat).

Berlangsungnya Adat *gala* dalam kehidupan masyarakat adat Aceh tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman, gadai *(gala)* terdapat di dalam Al-Qur’an, kebolehan gadai *(gala)* tercermin dalam Surah Al-Baqarah ayat 283, yaitu: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)…”. Kemudian hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “Dari Siti Aisyah R.A. bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi.”

Berdasarkan landasan di atas, para ulama sepakat bahwa gadai hukumnya boleh dan tidak wajib, dikarenakan gadai hanya merupakan jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Akan tetapi, jika kedua belah pihak saling mempercayai satu sama lain, maka jaminan mungkin tidak diperlukan. Hal ini tercermin dari firman Allah berikut: “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya)” (QS. Al-Baqarah: 283). Ayat ini juga memberikan tafsiran bahwa jaminan hanya disyaratkan jika tidak ada penulis diantara orang yang bertransaksi tersebut.[[3]](#footnote-3)

Adat *Gala* dalam masyarakat adat Aceh mempunyai nilai-nilai dan konsep kebersamaan dan tolong-menolong antar sesama manusia *(habluminannas)* dan mengharapkan ridha (pahala) dari Allah *(wa habluminallah)*. Maka jika bertempu pada konsep tersebut tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat adat Aceh menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan.[[4]](#footnote-4)

*Gala* yang berkembang dalam masyarakat adat Aceh pada umumnya hampir sama dengan gadai yang berlaku pada masyarakat pada daerah yang lain. Pada awalnya objek dalam perjanjian *gala* hanya berupa tanah sawah *(umoeng blang)*, kebun *(seunuebok)*, ladang (*lampoeh)* dan tambak ikan *(neuheun)* yang dianggap masih produktif.[[5]](#footnote-5) Namun seiring perkembangan zaman objek dari suatu perjanjian *gala* juga dapat digunakan pada barang-barang lainnya yang berobjekkan selain tanah berupa emas, kendaraan bermotor, surat-surat berharga dan barang-barang lainnya yang dianggap mempunyai nilai-nilai dan berharga.

*Gala* merupakan suatu perjanjian pinjam-meminjam antara kedua belah baik pada pihak pemberi *gala* maupun pihak penerima *gala* untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dielakkan dengan tujuan agar tepenuhinya kebutuhan finansial dalam kehidupan sehari-hari.

Pada sistemnya apabila telah tercapainya kesepakatan oleh para pihak yang melakukan perajanjian *gala,* maka pihak pemberi *gala* menyerahkan *tanoeh* (tanah), *meuh* (emas) atau benda yang dianggap berharga lainnya untuk dijadikan sebagai objek *gala* (angunan) oleh pihak penerima *gala*, sedangkan pada pihak penerima *gala* menyerahkan uang sebesar yang diperjanjikan antara kedua belah pihak tersebut secara tunai kepada pihakpemberi *gala*. Pada prinsipnya penyerahan uang dari pihakpenerima *gala* kepada pihakpemberi *gala* harus berbentuk tunai *(cash)* dan tidak boleh dicicil.

Setelah terjadinya penyerahan oleh para pihak, maka hak milik yang berada pada pihak pemberi *gala* beralih menjadi hak pakai kepada pihak penerima *gala* sampai objek *gala* (agunan) telah ditebus oleh pihak pemberi *gala*. Hasil yang diperoleh selama berlangsungnya perjanjian *gala* akan dianggap sebagai dari hasil balas jasa terhadap uang yang telah diberikan oleh pihak pemberi *gala*.

Berakhirnya suatu perjanjian *gala* dapat dikarenakan objek yang di*gala*kan (agunan) telah di ditebus kembali oleh pihak pemberi *gala* kepada pihak penerima *gala* atau objek *gala* dialihkan kepada pihak ketiga, kecuali diperjanjikan sebelumnya mengenai jangka waktu tertentu kapan berakhirnya perjanjian *gala* oleh para pihak yang berkaitan.

Apabila diperhatikan mekanisme pelaksanaan perjanjian *gala* di dalam kehidupan masyarakat adat Aceh*,* berakhirnya suatu perjanjian *gala* tanpa adanya ketentuan waktu yang jelas tentunya akan memberatkan pihak pemberi *gala* dikarenakan objek *gala* (agunan) yang dulunya digunakan sebagai alat yang digunakan untuk mencari nafkah untuk menebus harta *gala*  tersebut telah beralih menjadi hak pakai kepada pihak penerima *gala*. Sedangkan disisi yang lain, pihak penerima *gala* terus menikmati hasil dari objek *gala* (agunan) tersebut tanpa mengurangi jumlah utang pihak pemberi *gala*. Hal tersebut tentunya akan timbulnya unsur penindasan terhadap pihak pemberi *gala* yang disebabkan oleh pihak penerima *gala*, dan tentunya dapat menghilangkan nilai-nilai tolong-menolong antar sesama dalam kehidupan masyarakat karena pada dasarnya perjanjian *gala* tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak karena keadaan mendesak dari segi keuangan.

Mazhab Syafi’i secara tegas tidak memperbolehkan bagi pihak penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadaian karena dapat mendatangkan kemudharatan kepada salah satu pihak. Jumhur ulama kecuali Hambali juga berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan objek gadai (agunan) dalam bentuk apapun. Pemanfaatan dibolehkan sebesar pengeluaran pihak penerima gadai terhadap barang gadaian, misalkan pihak penerima gadai boleh menikmati susu sapi gadaian sebanyak makanan yang diberikan untuk lembu.[[6]](#footnote-6)

Objek gadai (agunan) dalam konteks ekonomi Islam memiliki makna filosofis dan sosiologis yang besar, pertama, objek gadai (agunan) digunakan sekadar untuk memastikan (jaminan) kepercayaan pada pihak pemberi gadai. Dengan demikian, pihak penerima gadai tidak akan ragu memberikan sejumlah uang kepada pihak pemberi gadai dikarenakan adanya barang jaminan, apabila pihak pemberi gadai dianggap sangat amanah dan tidak diragukan bahwa ia akan menunaikan utang sesuai dengan perjanjian, tentu barang jaminan tidak diperlukan. Kedua, utang yang merupakan salah satu konsep utama dalam perjanjian gadai yang merupakan media membantu orang lain dan tidak berharap untuk mendapatkan laba (untung) dari pemberian utang itu. Apabila pihak penerima *gala* (gadai) mengisyaratkan pembayaran tambahan maka perjanjian *gala* tersebut dapat menjurus menjadi riba.[[7]](#footnote-7)

Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), gadai dalam tatanan hukum nasional diatur pada Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Pada peraturan ini memberikan pembatasan mengenai batas waktu dalam suatu perjanjian gadai dalam hal tanah serta melindungi pihak pemberi gadai.

Setiap aturan adat yang hidup di dalam kehidupan masyarakat adat Aceh tidak dibolehkan merugikan pihak lain ataupun melanggar dari ketentuan-ketentuan nilai-nilai keislaman. Pengaturan yang bersangkutan yang berkaitan dengan perihal yang bersangkutan dengan adat dan istiadat telah diatur dalam *Qanun*[[8]](#footnote-8) Nomor 9 Tahun 2008, di dalam Pasal 2 (dua) ayat (2) menyebutkan: pembinaan, pengembangan, pelestarian dan perlindungan terhadap adat dan istiadat harus meliputi dan berpedoman pada nilai-nilai Islami.

Pada dasarnya, dalam kehidupan masyarakat di Aceh khususnya dalam bidang perekonomian masih merupakan dari cerminan dari agama Islam yang dianut oleh masyarakat Aceh sejak dahulu setelah masuknya Islam di Aceh. Namun tidak dapat dipungkiri kegiatan-kegiatan perekonomian yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pun masih tersisa pengaruh-pengaruh budaya zaman pra Islam dan pengaruh perkembangan teknologi serta pola pikir masyarakat sehingga memberikan nampak yang positif dibeberapa aspek berkehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah pada aspek ekonomi dalam hal ini adalah perjanjian *gala*.

Kesesuaian perjanjian *gala* seharusnya tidak boleh terlepas dari konsep dasar yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan tolong-menolong antar sesama yang menjadi panduan dalam kehidupan masyarakat Aceh, akan tetapi dalam pelaksaannya belum sesuai sepenuhnya berdasarkan ketentuan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu*,* penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Rekonstruksi Perjanjian *Gala* (Gadai Adat) pada masyarakat adat Aceh berbasis syariah”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan perjanjian *gala* dalam masyarakat adat Aceh?
2. Bagaimanakah konsep perjanjian *gala* ditinjau dari perspektif syariah?
3. Bagaimanakah bentuk rekonstruksi perjanjian *gala* berbasis syariah?
4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini diharapkan tercapainya tujuan-tujuan yang diantaranya sebagaimana berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pelaksanaan perjanjian *gala* dalam masyarakat adat Aceh.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis konsep perjanjian *gala* ditinjau dari perspektif syariah.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk rekonstruksi perjanjian gala berbasis syariah.
4. **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis diharapkan agar dapat menambah, memperkaya serta memberikan suatu konstribusi dan wawasan baru pada suatu penjajian adat *(gala)* dalam kehidupan masyarakat adat Aceh berdasarkan perspektif syariah.

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar berguna bagi seluruh elemen baik itu pihak pemerintahan baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, aparatur *gampong.* serta, lembaga-lembaga adat dalam mengambil suatu kebijakan serta seluruh komponen-komponen masyarakat adat dalam hal melaksanakan mekanisme perjanjian *gala* sesuai dengan nilai-nilai keislamanyang berlaku di Aceh.

1. **Kerangka Konseptual**

Di era globalisasi saat ini, keberadaan pluralisme hukum memang tidak dapat dielakkan. Konsep Pluralisme hukum tidak lagi berkembang dalam ranah dikotomi antara sistem hukum negara *(state law)* disatu sisi dengan sistem hukum rakyat *(folk law)* dan hukum agama *(religious law)* disisi lain. pada tahap perkembangan ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi dan ko-eksistensi berbagai sistem yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses dan institusi hukum dalam masyarakat.

Pada hubungan tersebut I Nyoman menyebutkan,[[9]](#footnote-9) bahwa hukum menjadi salah satu produk kebudayaan yang tak terpisahkan dengan segi-segi kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, struktur dan organisasi sosial, idiologi, religi. Maka untuk mengungkapkan teori hukum sebagai suatu sistem *(the legal system)* yang diintroduksi Friedman sebagai berikut:[[10]](#footnote-10)

1. Hukum sebagai suatu sistem pada pokoknya memmpunyai 3 (tiga) elemen, yaitu (a) struktur sistem hukum *(structure of legal system)* yang terdiri dari lembaga pembuat undang-undang *(legislative),* institusi pengadilan dengan struukturnya, lembaga kejaksaan dengan strukturnya, badan kepolisian negara, yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum,(b) substansi sistem hukum *(substance of legal system)* yang berupa norma-norma hukum, dan (c) budaya hukum masyarakat *(legal culture)* seperti nilai-nilai, ide-ide, harapan-harapan dan kepercayaan-kepercayaan yang terwujud dalam prilaku masyarakat dalam mengapresiasikan hukum.
2. Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri. yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan prilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan *(customs),* budaya *(culture),* tradisi-tradisi *(traditions*), dan norma-norma informal *(informal norms)* yang diciptakan dan dioprasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pada beberapa negara sudah mengakui akan kehadiran serta keberadaan hukum lokal*,* sehingga dalam perkembangannya hukum lokal justru ditempatkan ditempat khusus dalam perkembangan hukum, baik itu dijadikan sebagai pemebentukan undang-undang maupun dalam pembentukan peraturan daerah.

Hukum adat sesungguhnya merupakan sistem hukum rakyat *(folk law)* khas Indonesia sebagai pengejawatan dari hukum adat *(the living law)* yang tumbuh dan berkembang berdampingan dengan sistem hukum lainnya yang hidup dalam negara Indonesia. disadari ataupun tidak, kadang hukum negara cenderung mendominasi, sehingga pada keadaan tertentu hukum negara dapat memberikan dampak mengabaikan atau memarjinalisasi eksistensi hak-hak masyarakat lokal dan sistem hukum rakyat (adat) pada tatanan implementasi dan penegakan hukum negara.

Dengan memahami beberapa hal di atas dan dengan ada kebijakan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, maka hal itu membuktikan sistem hukum adat akan berkembang dan dengan baik berdampingan dengan sistem hukum lainnya.

Menurut B. Terhaar Bzn, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam suatu keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat yang berlaku spontan dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini Terhaar terkenal dengan teori keputusan yang artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap pihak pelanggar peraturan adat istiadat sementara itu menurut Cornelis Van Vollen Hoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasi, menurut J.H.P. Bellefroit hukum adat sebagai peraturan-peratuan yang hidup meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

Sistem hukum adat di Indonesia selalu hidup berdampingan dengan sistem hukum lainnya, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa untuk menemukan pruralisme hukum, tidak mungkin bisa dikaji melalui hukum formal semata. akan tetapi untuk menemukan suatu prularisme hukum harus dikaji harus terjun ke dalam masyarakat.[[11]](#footnote-11) sehingga pada kenyataannya pluralisme hukum tidak dapat dipisahkan.

Keberadaan hukum adat juga diakui akan keberadaannya terutama di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sekaligus memberikan pengakuan terhadap hukum adatnya. Sehingga dengan demikian berlakunya hukum adat bukanlah tergantung kepada penguasa negara atau tergantung kepada kemauan politik penyelenggara negara, melainkan bagian dari kehendak konstitusi.

Hukum adat pada masyarakat Aceh pada umumnya identik dengan hukum agama serta aturan-aturan diwarisi para leluhur yang berdasarkan nilai-nilai syariah.[[12]](#footnote-12) Timbulnya perjanjian *gala* pada masyarakat Aceh tidak terlepas dari konsep tolong-menolong. Dalam ajaran Islam tolong-menolong merupakan kewajiban setiap muslim. Artianya tolong-menolong di sini hanya diperbolehkan dalam konteks kebaikan dan takwa serta tidak diperbolehkan tolong-menolong dalam hal dosa atau permusuhan.[[13]](#footnote-13) Berdasarkan konsep tersebut, perbuatan tolong-menolong antar sesama dalam kehidupan masyarakat adat Aceh dianggap merupakan suatu perbuatan terpuji dan sangat susah untuk tidak dilaksanakan.

Perjanjian *gala* yang telah dipraktikkan selama ini dalam perkembangannya mengalami sedikit gradasi akibat pengaruh budaya luar dan kemajuan teknologi serta perkembangan alur pikir masyarakat. Pengaruh-pengaruh tersebut akhirnya membawa perubahan kearah yang bersifat negatif dan bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Melihat hal-hal yang berdampak positif sebagaimana di atas hal ini tentunya dapat menimbulkan ketidak sesuaian antara aturan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) *Qanun* Nomor 8 tahun 2009 tentang Adat dan Istiadat yang menyatakan setiap aturan adat dalam kehidupan masyarakat tidak boleh terlepas dari nilai-nilai islami.

Berdasarkan kenyataan tersebut, menjadi penting memproyeksikan konsep dari teori *receptie a contrario,* dalam hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana telah dikemukankan oleh Sayuti thalib yang menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.[[14]](#footnote-14)

1. **Metodologi Penelitian**
2. **Lokasi penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kemukiman Kuta Reuntang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Kecamatan Meurah Dua terbagi atas 3 (tiga) kemukiman, yaitu Kemukiman Kuta Simpang, Kuta Baroh dan Kuta Reuntang. Dikarenakan luasnya wilayah Kecamatan Meurah Dua yang terbagi menjadi 3 kemukiman, maka dipilihlah satu Kemukiman Kuta Reuntang sebagai sampel penelitian.

Dalam satu kemukiman Kuta Reuntang sendiri terdiri atas 9 (Sembilan) *Gampong,* yaitu:[[15]](#footnote-15)

1. Gampong Lhok Sandeng.
2. Gampong Sarah Mane.
3. Gampong Seunong.
4. Gampong Lancok.
5. Gampong Meunasah Kulam.
6. Gampong Meunasah Teungoh.
7. Gampong Geunteng.
8. Gampong Meunasah Bie, dan.
9. Gampong Meunasah Raya.

Adapun alasan pemilihan dari Kemukiman Kuta Reuntang dikarenakan berdasarkan pengamatan, pada Kemukiman Kuta Reuntang ini masih banyak masyarakat-masyarakat yang aktif serta lebih memilih untuk melakukan perjanjian *gala*, baik itu sebagai pihak pemberi *gala* ataupun pihakpenerima *gala*.

1. **Pendekatan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah serta tujuan maka pendekatan digunakan merupakan pendekatan *yuridis empiris.* Pendekatan ini digunakan dalam rangka menemukan bentuk perjanjian *gala* yang hidup dalam pada masyarakat adat Aceh berdasarkan perspektif syariah. Pendekatan ini tidak berhenti pada hukum dalam ketentuan perundang-undangan, namun melihat hukum dalam konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat.[[16]](#footnote-16)

1. **Spesifikasi penelitian**

Spesifikasi pada penelitian ini ialah *Socio-legal research,* dilakukan dengan cara menggabungkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dari dua atau beberapa disiplin *(interdisipliner)* untuk menjawab suatu persoalan hukum. dalam hal ini, masalah hukum diselesaikan dengan menggabungkan kajian hukum dan sosiologis-antropologis, khususnya pluralism hukum.[[17]](#footnote-17)

1. **Jenis data**

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang difokuskan berdasarkan pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadinya penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan.

Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yang digunakan diperoleh dari penelitian lapangan *(field research)*. Data lapangan dibutuhkan untuk memperoleh informasi mengenai eksistensi, mekanisme serta penyelesaian sengketa dalam perjanjian *gala* dalam kehidupan masyarakat adat di Aceh, melalui informan dan observasi.

1. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui hasil penelitian kepustakaan *(library research),* berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (jurnal-jurnal dan hasil penelitian ilmiah lainnya).

1. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi-informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, ensiklopedia, artikel-artikel, majalah, Koran, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian *gala*.[[18]](#footnote-18)

1. **Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi (pengamatan) dan wawancara pada lokasi penelitian, yakni pada Kemukiman Kuta Reuntang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya. Dengan harapan akan mendapatkan data tentang eksistensi dan pelaksanaan perjanjian *gala*. sedangkan data sekunder adalah data tambahan yang dilakukan dengan studi kepustakaan, baik itu yang terdapat pada naskah, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai penunjang dan pendukung di dalam melakukan analisa.

Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sedangkan instrumental pendukung yang digunakan adalah wawancara secara mendalam dan tidak terstruktur dan observasi. Untuk mendapatkan kepercayaan orang-orang yang menjadi penelitian sasaran penelitian. Sedangkan informan kunci *(key-informant)* ditentukan dengan prinsip fleksibel dan mengalir *(snowballing)*. Adapun informan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh 1 (satu) orang.
2. Ketua Majelis Adat Aceh 1 (satu) orang.
3. Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten 1 (satu) orang.
4. Ketua Majelis Adat Aceh *Gampong* (desa) 1 (satu) orang.
5. Camat Kecamatan Meurah Dua 1 (satu) orang.
6. Ketua *Mukim* 1 (satu) orang.
7. *Keuchik* (kepala desa).
8. Para pihak dalam perjanjian *gala* yaitu, pihak pemberi *gala* dan pihak penerima *gala*.
9. **Metode analisis dan validasi data**

Tujuan analisis di dalam penelitian adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, serta tersusun hingga lebih berarti. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan-rumusan dan pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang diperoleh dari suatu obyek penelitian.[[19]](#footnote-19)

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[[20]](#footnote-20)

Pada validasi data menggunakan teknik triagulasi sumber (menggunakan komparasi data dan sumbernya untuk mensistematisasi perbedaan dan persamaan pandangan berdasarkan kualifikasi dan situasi sumber dengan dokumen) dan metode (pengecekan melalui teknik pengumpulan data, observasi partisipatif, dan wawancara mendalam).

1. **Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah pembahasan maka hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab akan dirincikan lagi beberapa sub bab sebagai mana berikut:

1. Bab I merupakan bab pembahasan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, teoritik dan konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II merupakan bab yang membahas kajian pustaka, yang terdiri dari tinjau pustaka yang akan digunakan penulis dalam mengkaji dan menganalisis hasil temuan.
3. Bab III merupakan pembahasan, yang meliputi hasil penelitian dan analisis, berisi uraian atas hasil penelitian dan analisis oleh penulis.
4. Bab IV merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta perumusan saran-saran serta rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Pengertian Hukum Adat dan Masyarakat Hukum adat**
2. **Hukum adat**

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Terjadinya hukum dimulai dari pribadi manusia yang diberikan oleh Tuhan berupa akal, pikiran serta perilaku. Prilaku yang terus menerus dilakukan oleh perorangan sehingga menimbulkan suatu kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru oleh orang lain maka ia juga akan menjadi kebiasaan sehingga lambat laun diantara orang satu dan orang yang lain di dalam suatu kesatuan masyarakat akan mengikuti atau mengikuti kebiasaan tersebut, dan akan menjadi suatu kebiasaan baru pada suatu masyarakat tersebut.

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya cipta, karsa, dan rasa manusia. dalam artinya bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.[[21]](#footnote-21)

Adat merupakan suatu kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi hukum adat. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.[[22]](#footnote-22)

Hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *recht*, sedangkan Adat berasal dari bahasa Arab yang artinya kebiasaan. Sedangkan istilah hukum adat itu berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *adat-recht*, istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dan pernah dipakai oleh Van Vollenhoven dalam menulis buku-bukunya yang mengenai hukum adat. Hukum adat merupakan suatu istilah penamaan yang digunakan untuk menyebut hukum yang berlaku bagi masyarakat asli di Indonesia.

Walaupun pemerintah sudah mengakui keberadaannya hukum adat, tetapi masyarakat Indonesia asli belum mengetahui seperti apa berlakunya hukum adat tersebut. Sehingga dalam penyebutannya dalam peraturan perundang-undangan masih banyak digunakan istilah yang berbeda-beda.

Dalam arti sempit hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis yang hidup dalam kebiasaan masyarakat asli Indonesia dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Di samping yang tidak tertulis ada juga yang tertulis seperti piagam, prasasti, perintah-perintah raja. Di bawah ini terdapat beberapa definisi hukum adat menurut para sarjana:[[23]](#footnote-23)

1. B. Terhaar Bzn.

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori Keputusan artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

1. Cornelis van Vollen Hoven

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.

1. Sukanto

Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.

1. J.H.P. Bellefroit

Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

1. Soerojo Wignjodipoero.

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagaian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

1. Soepomo.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas, maka terlihat unsur-unsur dari pada hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat.
2. Tingkah laku tersebut bersifat teratur dan sistematis.
3. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai-nilai yang sakral.
4. Adanya keputusan dari kepala adat.
5. Adanya sanksi atau akibat hukum.
6. Tidak tertulis, dan.
7. Ditaati dalam kehidupan masyarakat.
8. **Masyarakat hukum adat**

Masyarakat hukum adat adalah suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup secara bersama dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga membentuk suatu kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu kesatuan dari sistem sosial, yang menjadi wadah dari berbagai pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal ataupun hubungan antar kelompok sosial.

Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari *indigeneous people*. Istilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan internasional, yaitu: *Convention of International Labor Organixation Concerning Indigeneous and Tribal People in Independent Countries* (1989), Deklarasi Cari Oca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992), Deklarasi Bumi Rio de Janairo (1992), *Declaration on the Right of Asian Indigenous Tribal People Chianmai* (1993), *De Vienna Declaration and Programme Action yang dirumuskan oleh United Nations World Conference on Human Right*s (1993). Sekarang istilah *indigenous people* semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Masyarakat Adat *(United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People)* pada tahun 2007.

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.[[24]](#footnote-24)

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumber daya alam dalam jangkauannya.[[25]](#footnote-25) Mereka memiliki sistem kebudayaan yang kompleks dalam tatanan kemasyarakatannya dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah dan sumber daya alamnya. Masyarakat hukum adat juga diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.[[26]](#footnote-26)

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.[[27]](#footnote-27)

Kusumo Pujosewojo memberikan pengertian yang hampir sama dengan Ter Haar, beliau mengartikan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar di antara anggota, memandang anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.[[28]](#footnote-28)

Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.[[29]](#footnote-29)

Menurut Soepomo dijelaskan bahwa Van Vollenhoven dalam orasinya tanggal 2 Oktober 1901 menegaskan:[[30]](#footnote-30) “Bahwa untuk mengetahui hukum, maka yang terutama perlu diselidiki adalah pada waktu dan bilamana serta di daerah mana sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari”. Bersandar dari pendapat tersebut, Soepomo mengungkapkan pendapatnya sendiri bahwa: “penguraian tentang badan-badan persekutuan itu harus tidak didasarkan atas sesuatu yang dogmatik, melainkan harus berdasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan”.[[31]](#footnote-31) Dari apa yang telah dikemukakan oleh Van Vollenhoven dan Soepomo terlihatlah bahwa masyarakat yang mengembangkan ciri khas hukum adat itu adalah Persekutuan Hukum Adat *(Adatrechts Gemeenschapen)*.

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan geneologis. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia-Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh para leluhur.[[32]](#footnote-32) Sedangkan masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.[[33]](#footnote-33)

Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar hukum tersebut maka dapat dirumuskan kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut:

1. Terdapat masyarakat yang teratur.
2. Menempati suatu wilayah tertentu.
3. Terdapat kelembagaan.
4. Memiliki kekayaan bersama.
5. Susunan masyarakat berdasarkan pertalian darah atau lingkungan daerah, dan.
6. Hidup secara komunal, dan gotong-royong.

Dalam buku *De Commune Trek in Bet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollemann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu *magis religious*, komunal, konkrit dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut:[[34]](#footnote-34)

1. Sifat *magis religious* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologka, animism, dan kepercayaan pada alam ghaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sisitem hukum agama perasaan *religious* diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Allah (Tuhan). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat perubahannya.
2. Sifat komunal *(commuun)*, masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
3. Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
4. Sifat kontan *(kontane handeling)* mengandung arti sebagai keserta-mertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta-merta/seketika.

Masyarakat adat menunjukkan hubungan yang erat dalam hubungan antar personal dan proses interaksi sosial yang terjadi antar manusia tersebut menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan cara *(a uniform or customary of belonging within a social group)*.[[35]](#footnote-35) Manusia pada dasarnya ingin hidup teratur dan kemudian setiap kelompok dalam masyarakat tersebut memiliki pengertian yang berbeda terhadap pengertian teratur. Keteraturan tersebut diperlukan untuk mengatur perilaku manusia dalam kelompok manusia dan hal inilah yang menguatkan konsep dan nilai-nilai komunal dalam masyarakat adat tersebut.[[36]](#footnote-36)

1. **Mukim dalam masyarakat adat Aceh.**

Asal-muasal adanya pemerintahan *mukim* yang berada pada masyarakat Aceh tidak terlepas dari mayoritas masyarakat Aceh yang beragama Islam, adanya *mukim* sendiri berawal dari dasar bagi penduduk tetap dalam suatu daerah dalam pelaksanaan ibadah shalat jumat. Berdasarkan Mazhab Imam Syafi’i untuk mendirikan shalat jum’at diperlukan lebih kurang 40 (empat puluh) orang laki-laki yang telah *baligh* (dewasa).

Pada dasarnya lembaga *mukim* terbentuk seiring masuknya agama Islam ke Aceh. Mukim merupakan suatu sistem pemerintahan yang berdiri sendiri dan dipimpin oleh seorang *Imum Mukim.* Imum Mukim dipilih secara langsung oleh tokoh-tokoh dalam suatu kemukiman tersebut, yang terdiri atas *Tuha Lapan.*[[37]](#footnote-37)

Pada masa kolonial Belanda keberadaan *Imum Mukim* tetap diakui dan diatur secara khusus dalam *Besluit van den Governeur van Nederland Indie* Nomor 8 Tahun 1937. Dalam masa penjajahan oleh bangsa Jepang pemerintahan *Mukim* juga diakui dalam *Osamu Serei* Nomor 7 Tahun 1944. Setelah Indonesia merdeka ketentuan-ketentuan mengenaipemerintahan *Mukim* tetap diberlakukan sebagaimana terdapat di dalam ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mempertahankan kedudukan *Mukim* dalam struktur pemerintahan desa, keresidenan Aceh mengeluarkan Peraturan Keresidenan Aceh Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946. Menurut kedua peraturan tersebut, pemerintahan *Mukim* diberlakukan untuk seluruh Aceh, dan Pemerintahan *Mukim* mempunyai kedudukan di bawah Camat dan membawahi beberapa *Gampong*.

Dalam pelaksanaannya pemerintahan *Mukim* digerakkan oleh tiga unsur yaitu unsur adat, unsur agama dan unsur dewan. Di dalam unsur adat diwakili oleh *Imum Mukim*, dalam unsur agama di wakili oleh *Imum Mesjid* dan dari unsur dewan dipimpin oleh *Tuha Lapan.* Sekalipun pada ketiga unsur tersebut adanya pemisahan kewenangan, namun dalam pengambilan suatu keputusan adanya suatu putusan yang bersifat bersama dan pelaksaan putusan harus dijelaskan oleh *imum mukim*, sehingga putusan yang diambil merupakan suatu putusan yang terdapat dari tiga unsur tersebut yang mewakili masyarakat, dan kemudian tiap-tiap putusan yang dikeluarkan menjadi suatu putusan yang didukung oleh seluruh masyarakat.

Sistem pemerintahan *Mukim* pada masyarakat Aceh sendiri tidak terlepas nilai-nilai keislaman, di mana ciri-cirinya sendiri adalah sebagai berikut:[[38]](#footnote-38)

1. Memperhatikan syarat-syarat keagamaan yang harus dipenuhi oleh para pimpinan pada tingkat Mukim dan Gampong.
2. Dapat dilihat dalam sistem pengelolaan tanah-tanah umum yang belum dimiliki oleh siapapun, yang oleh masyarakat Aceh disebut sebagai tanoh Potallah (tanah Tuhan). Dalam hal ini, siapa yang menghidupkan dan mengusahakan tanah mati tersebut, dialah yang berhak atas tanah tersebut, untuk dimiliki atau dialihkan kepada orang lain, tentu saja setelah syarat-syarat adat terpenuhi.
3. Dalam penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian melalui musyawarah dan bertujuan untuk membangun kembali harmonisasi pasca sengketa dalam antar para pihak dalam suatu kehidupan bermasyarakat.

Pemerintahan *Mukim* diatur dalam *Qanun* Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim*, adapun tugas dan fungsi *Mukim* di dalam pasal 3 dan 4 meliputi:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desentralisasi, dekonstrasi, pembantuan dan segala urusan pemerintahan lainnya.
2. Menyelenggarakan pembangunan ekonomi, fisik dan mental spiritual.
3. Menyelenggarakan pelaksanaan syari’at Islam, pendidikan, adat istiadar, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Menyelenggarakan pelayanan pada masyarakat.
5. Menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.

Sedangkan tugas Imum Mukim menurut dan Pasal 8 *Qanun* Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat adalah:

1. Melakukan pembinaan masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan adat istiadat.
3. Menyelesaikan sengketa.
4. Membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam.
5. Membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan.
6. Membantu pelaksanaan pembangunan.

Maka apabila melihat peraturan diatas *Imum Mukim* pada suatu kemukiman selain mempunyai peran untuk membantu tugas dari Camat untuk dapat mengawasi desa, *Imum Mukim* juga mempunyai peran dalam memutuskan dan atau menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat istiadat di dalam kehidupan bermasyarakat.

1. **Pengertian Perjanjian Menurut Hukum Adat**

Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud dengan hukum perjanjian adat adalah hukum yang meliputi uraian tentang hukum perhutangan *(schuldenrecht)* termasuk soal transaksi-transaksi tanah *(groundtransakties)* dan transaksi-transaksi yang menyangkut tanah *(transaksi waarbij ground betrokkenis)*.

Dalam hukum perhutangan *(schuldenrecht)* dalam hukum adat menyangkut:[[39]](#footnote-39)

1. Beri-memberi.
2. Pakai-memakai.
3. Pinjam-meminjam.
4. Tanggung-menanggung.
5. Tukar-menukar.
6. Jual-beli.
7. Titip-menitip.
8. Urus-mengurus.
9. Sewa-menyewa.
10. Kerja-mengerjakan.

Terhadap perjanjian yang menyangkut tanah antara lain menurut hukum adat adalah:

1. Perjanjian bagi-hasil.
2. Perjanjian sewa-menyewa.
3. Perjanjian berganda.
4. Perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan tanah.
5. Perjanjian semu (simulasi).

Hukum perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan hukum perjanjian adat mempunyai perbedaan-perbedaan. Perbedaan ini disebabkan oleh latar belakang alam pikiran kebudayaan masyarakat yangmelahirkan hukum yang berasal dari dasar kejiwaanya. Hukum perjanjian barat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kepentingan perseorangan yang bersifat kebendaan, sedangkan hukum perjanjian adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kekeluargaan dan kerukunan serta bersifat tolong-menolong. Di samping itu perjanjian menurut hukum barat menerbitkan perikatan, sedangkan perjanjian menurut paham adat untuk mengikatnya perjanjian harus adanya tanda pengikat dan kemudian perjanjian menurut hukum adat tidak selamanaya menyangkut hubungan hukum mengenai harta benda, tetapi juga menyangkut dengan perjanjian selain kebendaan. Perbedaan yang lainnya terletak pada sifat dari suatu perjanjian.

Menurut Mahadi yang menyatakan perjanjian adat tidak hanya bersifat konsensual saja tetapi juga bersifat kongkrit, oleh karena itu kata-kata saja belum dapat mengikat persesuaian paham, akan tetapi harus bersifat kongkrit.[[40]](#footnote-40) Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa hukum adat tidak mengenai perbedaan antara benda-benda tetap dan benda-benda bergerak, tetap atau tidak tetapnya suatu benda dilihat dari kemungkinan dan keadaannya.[[41]](#footnote-41)

1. **Pengertian Perjanjian Gadai**

Gadai merupakan suatu praktik ekonomi yang telah berada sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Istilah gadai diperkenalkan oleh Van Vollenhoven, menurutnya gadai merupakan suatu perjanjian tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai dengan permufakatan bahwa si penyerah gadai berhak memperoleh kembali hak atas kembalinya barang yang digadaikan apabila telah membayarkan sejumlah uang yang sama kepada pihak penerima gadai.[[42]](#footnote-42)

Selain Van Vollenhoven, pengertian gadai menurut beberapa sarjana yang lain adalah sebagai berikut:

1. Ter Haar berpendapat gadai tanah merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan bahwa tanah yang diserahkan untuk mendapatkan sejumlah uang tunai, dengan pemufakatan bahwa pihak penyerah berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri dengan jalan membayar sejumlah uang yang sama.
2. Soerojo Wignjodipuro menjelaskan bahwasanya gadai adalah penyerahan kontan disertai ketentuan, bahwa yang menyerahkan tanah mempunyai hak mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran uang yang sama jumlahnya.
3. A. Fauzi Ridwan, pengertian gadai adalah suatu transaksi (penyerahan) tanah kepada pihak lain (pemegang gadai) dengan menerima sejumlah uang pembayaran dengan tunai, dengan perjanjian bahwa pemberi gadai yang menyerahkan tanah berhak menarik kembali tanah itu dengan jalan menebus pembayaran di atas.

Pada hukum tanah adat terdapat istilah menjual gadai ini tidak sama pengertian dengan istilah menjual lepas, menjual tahunan, walaupun ketiga jenis ini merupakan transaksi tanah yang bersifat *riil* di dalam hukum harta kekayaan. Pada prinsipnya pemilik tanah yang melakukan transaksi gadai tidak menginginkan pelepasan tanahnya itu kepada pihak lain, melainkan pada suatu saat tertentu pihak pemilik tanah dapat menebus hak atas tanah tersebut dengan syarat membayar kembali uang tebusan yang diterimanya dahulu. Adanya penebusan kembali ini merupakan salah satu ciri jual gadai yang artinya sebelum ditebus tanah yang bersangkutan berada dalam penguasaan pemegang gadai.

Kata gadai memperoleh berbagai macam sebutan di dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia, dimisalakan saja pada daerah Medan disebut dengan *menggadai,* di Minangkabau disebut dengan nama *manggadai,* di Riau dan Jambi disebut dengan *menjual gade,* di Jawa disebut dengan *odol sende*, di Sunda diberi sebutan dengan *jual sande*, di Pariangan, Bogor, Purwokerto Selatan dan Kuningan memakai istilah *akad, gade, jual akad* atau *tandon*, di Jakarta, Cirebon dikenal dengan istilah *gade* dan pada masyarakat Aceh pada umumnya mengenal dengan istilah *gala*[[43]](#footnote-43)

Dalam penerapan asas-asas hukum adat tidaklah bersifat mutlak, pada prakteknya sendiri selalu memperhatikan dan disesuaikan dengan perkembangan, kenyataan dan kebutuhan dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Dalam suatu perjanjian *gala* ditemukan asas-asas umum dalam transaksi *gala* sebagai berikut:[[44]](#footnote-44)

1. Asas Tolong-menolong.
2. Asas Kepercayaan.
3. Asas konsesualisme dan kongkrit *(Riil)*, dan.
4. Asas Musyawarah.
5. **Obyek gadai**

Sesuatu yang menjadi objek gadai dalam masyarakat adat mencakup tanah dan benda lain selain tanah yang dianggap berharga. Menurut R. Subekti dalam makalahnya pada seminar Hukum Jaminan Nasional 1978, dengan judul Suatu Tinjauan Tenatang hukum Jaminan Nasional dikatakan bahwa istilah gadai mempunyai arti yang sangat luas, menurut hukum adat arti asli dari gadai ini bisa ditunjukan kepada tanah dan bukan tanah. Selanjutnya dikatakan bahwa pada umumnya orang Indonesia sudah terbiasa mengatakan sawah, rumah dan perabotan telah digadaikan meskipun objek yang digadaikan masih dipakai terus menerus.

Soerojo Wignjodipuro, mengatakan bahwa objek gadai pada umumnya tanah tetapi dapat dipersamakan pula dengan tanah adalah kolam ikan, rumah dan pekaranganyanya serta pohon-pohon, buah-buahan beserta kebunnya.[[45]](#footnote-45)

Pengertian tanah sebagai objek gadai dalam hukum adat termasuk di dalamnya adalah tambak ikan,[[46]](#footnote-46) dan juga pohon-pohon, rumah-rumah dapat menjadi objek gadai apabila yang digadaikan bersama-sama dengan halamannya.

Soekanto selanjutnya mengatakan bahwa dalam hukum tanah adat yang dapat menjadi suatu objek dalam perjanjian gadai adalah tanah, selain tanah yang dapat dijadikan objek perjanjian gadai adalah kolam, tambak, kebun dan barang-barang yang bersifat *religio magis* misalkan jimat, keris yang dapat dijadikan sebagai suatu objek gadai.[[47]](#footnote-47) Maka berdasarkan pendapat tersebut, yang dapat dijadikan sebagai objek dalam suatu perjanjian gadai itu boleh tanah atau objek yang berupa selain tanah.

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa objek dari perjanjian gadai dapat berupa tanah dan selain tanah berupa benda-benda berharga lainnya. Namun, dalam perjanjian *gala* pada masyarakat adat Aceh pada umumnya *gala* dilakukan pada objek tanah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan benda-benda yang lain juga dapat dijadikan sebagai objek dari suatu perjanjian *gala* (gadai).

1. **Hak dan kewajiban bagi pihak pemberi dan penerima gadai**

Hak gadai timbul dari perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang, dari hubungan utang piutang ini akan menimbulkan hubungan hukum gadai yang mengakibatkan perikatan antara penerima gadai dan pemberi gadai. Perikatan ini menimbulkan hak dan kewajiban timbal-balik sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[[48]](#footnote-48) Selama perjanjian gadai berlangsung, pemberi gadai dan penerima gadai tidak lepas dari hak dan kewajibannya masing-masing sebagai bentuk pertanggung jawaban atas benda gadai.

1. Hak-hak pemberi gadai:[[49]](#footnote-49)
2. Pemberi gadai berhak untuk menuntut apabila barang itu telah hilang atau mundur sebagai akibat dari kelalaian pemegang gadai.
3. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang gadai apabila barang gadai akan dijual.
4. Pemberi gadai berhak mendapatkan kelebihan atas penjualan barang gadai setelah dikurangi dengan pelunasan hutangnya.
5. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang yang digadaikan apabila hutangnya telah dibayar lunas (ditebus).
6. Kewajiban pemberi gadai:[[50]](#footnote-50)
7. Pemberi gadai menyerahkan barang yang dipertanggungkan sampai pada waktu hutang dilunasi, baik mengenai jumlah pokok maupun bunga.
8. Pemberi gadai bertanggung jawab atas pelunasan hutangnya, terutama dalam hal penjualan barang yang digadaikan.
9. Pemberi gadai berkewajiban memberikan ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan atas barang yang digadaikan.
10. Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, pemberi gadai harus menerima jika pemegang gadai, menggadaikan kembali barang yang digadaikan tersebut.
11. Hak Pemegang/penerima Gadai:[[51]](#footnote-51)
12. Menjual dengan kekuasaan sendiri *(parate eksekusi).*

Yang dimaksud dengan *parate eksekusi* adalah suatu wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitur tanpa memiliki *eksekutorial titel*. Dalam hal pemberi gadai melakukan wanprestasi tidak memenuhi kewajiban setelah jangka waktu yang ditentukan itu telah terlampaui apabila oleh semua pihak tidak ditentukan lain atau diperjanjikan lain atau jika tidak ditentukan sesuatu, maka pihak berpiutang atau pemegang gadai berhak untuk menjual atas kekuasaan sendiri benda gadai.

Hak pemegang gadai ini tidak lain dari perjanjian yang secara tegas dinyatakan oleh para pihak, akan tetapi demi hukum kecuali kalau diperjanjikan lain. Hak pemegang untuk menjual barang atas kekuasaanya sendiri ini tidak tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur secara khusus. Dalam sistem gadai, penjualan barang harus dilakukan dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim berlaku kemudian dari hasil penjualan tersebut diambil untuk dilunasi hutang debitur, bunga dan biasanya dikembalikan kepada debitur sesuai dengan apa yang telah disebutkan di dalam Pasal 1155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1. Hak menjual barang gadai dengan perantara hakim.

Penjual benda gadai untuk mengambil pelunasan dapat juga terjadi jika pihak berpiutang menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya, hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang pemberi gadai. Jika terdapat kelebihan maka dikembalikan kembali kepada pemberi gadai tetapi jika hasil penjualan tidak bisa digunakan melunasi hutang atau terdapat kekurangan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak penerima gadai.

1. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai.

Jika pihak berpiutang atau pemegang gadai dapat menuntut agar barang gadai tetap berada pada pihak pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonis hingga sebesar piutangnya beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

1. Hak untuk mendapatkan ganti-rugi.

Pemegang gadai berhak untuk mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna yang telah dikeluarkan oleh pihak berpiutang atau pemegang gadai untuk menyelamatkan benda gadai tersebut.

1. Hak retensi *(recht van terughoudeng)*.

Selama pemegang gadai tidak menyalahkan gunakan barang yang diberikan dalam gadai maka pihak berpiutang sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya yang untuk menjamin barang gadai telah diberikan beserta biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

1. Hak didahulukan *(recht van worrang).*

Kreditur atau pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan tagihan-tagihan lainnya, baik itu terhadap hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya (Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hak tersebut dapat dilihat dari kreditur atau pegang gadai untuk menjual barang gadai atas kekuasaan pemegang gadai sendiri maupun melalui bantuan hakim (Pasal 1155 dan Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Terhadap hak yang diduhulukan ini ada pengendaliannya yaitu biaya lelang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai tersebut.

1. Kewajiban pemegang atau spenerima gadai:
2. Pemegang gadai bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemunduran harga barang gadai jika itu terjadi akibat kesalahan atau kelalaian pemegang gadai (Pasal 1157 ayat 1 Kitab- Undang-undang Hukum Perdata).
3. Kewajiban untuk memberitahukan pihak pemberi gadai jika barang gadai (agunan) dijual. Kewajiban memberitahukan ini selambat-lambatnya pada hari berikutnya, pemberitahuna kepada pemberi gadai adalah perwujudan dari asas-asas itikad baik yaitu untuk mencegah pemegang gadai menjual benda gadai secara diam-diam.
4. Pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan dari penjualan barang gadai dan setelah ia mengambil pelunasan hutangnya maka harus menyerahkan kelebihannya kepada debitur.
5. Pemegang gadai harus mengembalikan barang gadai apabila utang pokok, bunga dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai telah dibayar lunas.
6. **Berakhirnya waktu gadai**

Pada umumnya berakhirnya perjanjian gadai terjadi apabila pihak pemberi gadai menebusnya dengan membayar kembali sejumlah uang yang telah diterima terlebih dahulu kepada pihak penerima gadai maka saat itulah perjanjian gadai berakhir. Terdapat beberapa pendapat sarjana diantaranya adalah: Ter Haar mengemukakan bahwa pada saat uang gadai itu diterima kembali, maka pada saat itulah berakhirnya hak penguasaan objek gadai pada pihak penerima gadai.[[52]](#footnote-52) Selanjutnya Van Dijk mengatakan bahwa berakhirnya gadai apabila sesudah penebusan gadai itu kembali menjadi hak milik penuh dari pihak pemberi gadai.[[53]](#footnote-53)

Berakhirnya gadai karena diperjanjikan yaitu dalam perjanjian disebutkan jangka waktu berakhirnya gadai artinya kalau pihak pemberi gadai tidak menebusnya maka pihak penerima gadai berhak menuntutnya melalui jalur hukum apakah dengan tidak ditebusnya objek gadai itu menjadi milik pihak penerima gadai sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat perjanjian yang dilanjutkan dengan penetapan hakim maka dengan demikian berakhirlah hubungan gadai. Dalam hal ini Soekanto mengemukakan bahwa bebeapa tempat sering kali terdapat kejadian pemberi gadai tidak mengembalikan uang untuk menebus dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan maka objek gadai (agunan) menjadi milik penerima gadai.[[54]](#footnote-54)

Soerojo wignjodipuro mengatakan bahwa dalam suatu transaksi perjanjian gadai biasanya disertai dengan perjanjian tambahan yang memuat klausula apabila objek gadai (agunan) tidak ditebus dalam masa yang dijanjikan, maka objek gadai (agunan) menjadi milik pihak penerima gadai.[[55]](#footnote-55) Di samping itu dimungkinkan juga objek gadai (agunan) tersebut dijual jika uangnya kurang ditambah dan jika lebih maka harus dikembalikan lagi kepada pemberi gadai.

Ter Haar mengatakan bila pihak pemberi gadai tidak mampu menebus, maka pihak penerima gadai dapat menuntut supaya tanah diserahkan kepadanya dengan “hak milik” atau mungkin tambahan bayaran bila uang gadainya lebih rendah dari pada harga penjualan objek gadai (agunan) tersebut. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa kalau dalam suatu hubungan gadai tentang tanah ditetapkan suatu tenggang waktu untuk menebus.

Berakhirnya gadai dikarenakan adanya penyerahan secara sukarela baik oleh pihak penerima gadai dengan pertimbangan bahwa selama berlangsungnya gadai sudah memperoleh kembali uang yang telah diberikan oleh pihak pemberi gadai atau pihak penerima gadai menyerahkan dengan suka rela objek gadai (agunan) kepada pihak pemberi gadai. Di samping itu ada juga pemberi gadai karena tidak sanggup menebusnya kembali maka dengan suka rela pihak pemberi gadai menyerahkan tanah tersebut kepada pihak penerima gadai dengan cara memperhitungkan harga tanah kalau uangnya lebih akan dikembalikan lagi kepada pemilik tanah, maka dengan hal tersebut berakhirnya hubungan gadai antara kedua belah pihak.

Berakhirnya gadai yang disebabkan oleh bencana alam atau lainnya apabila objek gadai itu musnah karena bencana alam misalnya banjir, gempa bumi, tsunami, longsor dan sebab yang lainnya maka hubungan gadai akan berakhir dan pihak peneri gadai tidak berhak memintakan uang gadainya kembali dari penggadai, jika objek gadai (agunan) tersebut musnah hanya sebahagian saja dari tanah yang digadaikan maka hubungan hukum jual gadai antara kedua belah pihak masih berlanjut.[[56]](#footnote-56)

Berakhirnya waktu gadai karena penetapan Pasal 7 Perpu 56 tahun 1960, dengan keluarnya perpu tersebut maka batas waktu gadai sudah ditentukan batas waktunya yaitu barang siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai pada waktu berlakunya peraturan ini apabila sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih harus mengembalikan kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Terhadap hak gadai yang berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 (tujuh) tahun maka pemilik tanah berhak meminta kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus: (7 + ½ - waktu berlangsungnya hak gadai X uang gadai). Ketentuan ini merupakan perubahan dari pada ketentuan atau kebiasaan yang terjadi dalam gadai tanah menurut hukum adat karena dalam hukum adat bahwa lampaunya waktu gadai tidak mengakibatkan berakhirnya hubungan gadai.

Rachmadi Usman menyebutkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata tidak mengatur secara khusus mengenai sebab-sebab hapus atau berakhirnya hak gadai. Namun demikian dari bunyi ketentuan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai lembaga hak jaminan gadai sebagaimana diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUHPerdata, adapun sebab-sebab yang menjadi dasar hapusnya hak gadai yaitu:

1. Hapusnya perjanjian pokok atau perjanjian yang dijamin dengan gadai, hal ini sesuai dengan sifat perjanjian pemberi jaminan yang merupakan perjanjian *accesoir*. Artinya ada atau tidaknya hak gadai itu ditentukan oleh eksistensi perjanjian pokok atau pendahulunya yang menjadi dasar adanya perjanjian pemberian jaminan. Ketentuan dalam Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian (perikatan) hapus karena alasan-alasan sebagai berikut:
2. Pelunasan.
3. Perjumpaan utang *(kompensasi)*.
4. Pembaharuan hutang *(novasi),* dan.
5. Pembebasan utang.
6. Lepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditor pemegang hak gadai, dikarenakan:
7. Terlepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditor (pemegang gadai) sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1152 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini tidak berlaku bila barang gadaian hilang atau dicuri orang, pemegang gadai masih mempunyai hak untuk menentunya kembali dan bila barang gadai yang dimaksud dapat kembali, maka hak gadanya dianggap tidak pernah hilang.
8. Dilepaskannya benda yang digadaikan oleh pemegang gadai secara sukarela.
9. Hapusnya benda yang digadaikan.
10. Terjadinya percampuran, dimana pemegang gadai sekaligus juga menjadi pemilik barang yang digadaikan tersebut.
11. Terjadinya penyalahgunaan barang gadai oleh pemegang gadai.
12. **Gadai dalam Aspek Syariah**

Dalam kehidupan masyarakat adat Aceh terdapat berbagai macam bentuk transaksi dalam kehidupannya, salah satu bentuk transaksi tersebut adalah gadai *(gala).* Gadai dalam fiqih islam disebut dengan *Ar-rahn, Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggung utang. *Ar-rahn* juga dapat dinamai dengan *Al-habsu* yang berarti penahanan terhadap suatu dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.[[57]](#footnote-57)

Adapun pengertian pengertian gadai yang dikemukakan oleh ahli hukum islam adalah sebagai berikut:

1. Ulama Syafi’iyah mendifinisikan sebagai berikut: “menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya”.
2. Ulama Hambaliyah mengungkapkan sebagai berikut: “suatu benda yang dijadikan sebagai kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya”.
3. Ulama Malikiyah memberikan pengertian sebagai berikut: “sesuatu yang dapat dijadikan dan mempunyai nilai dari sesuatu harta *(mutamawwal)* yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan sebagai pengikat atas utang yang tetap (mengikat)”.
4. Imam Ibnu Qudhammah dalam kitab *Al-mughni* menyebutkan bahwa suatu benda yang dijadikan sebagai suatu benda yang dijadikan sebagai bentuk kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayar dari orang yang berpiutang.
5. Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendifinisikan *Rahn* adalah menjadikanbenda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari suatu harta benda tersebut apabila utang tidak dapat dibayarkan.

Berdasarkan pendapat para ahli Islam di atas, maka pengertian gadai dalam konsep Islam adalah menahan harta milik pihak pemberi gadai sebagai jaminan (jaminan utang) atas pinjaman yang diterimannya pihak penerima gadai. gadai dalam perspektif syariah agak berbeda dengan pengertian dalam pengertian gadai yang berada dalam hukum positif seperti tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).[[58]](#footnote-58)

Selain adanya perbedaan dengan aturan yang terdapat di dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata, maka pengertian gadai menurut perspektif syariah juga mempunyai perbedaan dengan pengertian gadai berdasarkan ketentuan yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran dengan sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan pihak pemberi gadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.[[59]](#footnote-59)

1. **Dasar hukum gadai syariah**

Dasar hukum yang menjadi sebagai landasar dasar dari gadai syariah adalah Al-quran, Hadits, *ijma’* ulama dan fatwa-fatwa majelis ulama indonesia (MUI). Adapun landasan-landasan terhadap gadai syariah adalah sebagai berikut:

1. **Al-quran**

Ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis berpendapat bahwa ayat Al-Quran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain melalui cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang *(rahn).*[[60]](#footnote-60)

 Syaikh Muhammad Ali As-Sayis juga mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang berinteraksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan Ali Syayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang.[[61]](#footnote-61) Sekalipun demikian, penerima gadai*.* Juga diperbolehkan tidak menerima barang jaminan dari pemberi gadai, dengan alasan bahwa ia menyakini pemberi gadai *(rahin)* tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab substansi dalam suatu peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudaratan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang[[62]](#footnote-62).

Fungsi barang gadai *(marhun)* pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai menyakini bahwa pemberi gadai beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya, serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya tersebut.[[63]](#footnote-63)

Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasi bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah suatu persyaratan keabsahan transaksi *rahn*. Apalagi, terdapat sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasullah Saw, menggadaikan baju besinya kepada seseorang Yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.

1. **Hadist**

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah haduts Nabi Muhammad SAW, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

1. Hadist Aisyah RA yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasanya Rasullah SAW membeli makanan dari seseorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.[[64]](#footnote-64) (HR. Muslim).

1. Hadist dari Anas bin Malik RA, yang diriwatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

Telah diriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: sungguh Rasullah SAW, menggadaikan baju besinya kepada seseorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untu keluarganya.[[65]](#footnote-65) (HR. Ibnu Majah).

1. Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-bukhari, yang berbunyi:

Telah diriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullaj bin mubarrak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau bersabda: “Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya”.[[66]](#footnote-66) (HR. AL-Bukhari).

1. Hadist riwayat Abu Hurairah RA, yang berbunyi:

“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan baginya resiko dan hasilnya”.[[67]](#footnote-67) (HR. Asy-Syafi’i dan Ad-Daruquthni).

1. ***Ijma’* ulama**

*Jumhur* ulama telah menyepakati akan kebolehan mengenai status hukum gadai. Hal ini didasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikaan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seseorang Yahudi, bahwa hal tersebut tidak lebih dari sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat ayng biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.[[68]](#footnote-68)

1. **Fatwa dewan syariah nasional**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn.*
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas*.*
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 09/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah.*
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 10/ DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah.*
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 43/ DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi
6. **Rukun dan syarat sah perjanjian gadai**

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam *(fiqh mu’ammalah)* dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, gadai sewa-menyewa ataupun yang semacamnya yang mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai. Hal dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Rukun gadai.**

Dalam fikih empat mazhab *(fiqh al-madzahib al-arba’ah)* diungkapkan rukun gadai adalah sebagai berikut:

1. *Aqid* (orang yang berakal)

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu (a) *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal dimaksudkan, didasari oleh *Sighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah-terima antara kedua belah pihak pemberi gadai dan penerima gadai) untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh 2 (dua) belah pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.[[69]](#footnote-69)

1. *Ma’qud ‘alaih* (barang yang diakadkan)

*Ma’qud ‘alaih* meliputi 2 (dua) hal, yaitu (a) *marhun* (barang yang digadaikan) dan (b) *Marhun bihi* *(dain)*, atau barang yang dikarenakannya diadakan akad *rahn.[[70]](#footnote-70)* Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya *shighat* sebagai rukun dari terjadinya *rahn*. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *shighat* tidak termasuk sebagai rukun *rahn,* melainkan *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan dan memberi utang dan menerima barang agunan tersebut).

Di samping itu, menurut ulama Hanafi untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* masih diperlukan apa yang disebut penguasaan barang oleh kreditor *(al-qabdh)*, sementara kedua pihak yang melaksanakan akan dan harta yang dijadikan agunan atau objek jaminan. Dalam pandangan ulama Hanafi lebih tepat dimasukkan sebagai *rahn* bukan rukun *rahn.*

1. **Syarat-syarat sah gadai dalam Islam.**

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat-syarat gadai sebagaimana dimaksud yang terdiri atas 1. *shighat,* 2. pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, 3. utang *(marhun bih),* dan 4. *marhun*.

1. *Shighat*

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang, misalnya orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu habis dan utang belum terbayar sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya, kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

1. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum yang ditandai dengan *aqil-baliq*, berakal sehat dan mampu melakukan akad. Menurut sebagian pengikut ulanma Abu Hanifah memperbolehkan anak-anak yang *mummayiz* untuk melakukann akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang menggadaikan *(ar-rahin)* dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum, lain halnya menurut mayoritas ulama, orang yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang telah *baligh* dan berakal. Sedangkan menurut mazhab Hanafi kedua belah pihak tidak diisyaratkan *baligh,* melainkan cukup berakal saja, oleh karena itu mazhab hanafi anak kecil yang *mumayyiz* yang sudah dapat membedakan suatu perbuatan baik dan buruk, maka ia dapat melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya.

1. Utang *(Marhun bih)*

Utang *(marhun bih)* mempunyai pengertian bahwa: (a) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang, (b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

1. Marhun

*Marhun* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya sebagai suatu jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan, yang ketentuannya adalah:[[71]](#footnote-71)

1. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam. Sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan.
2. Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
3. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
4. Agunan itu sah milik pemberi gadai.
5. Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
6. Agunan tersebut harus berupa harta yang utuh dan tidak berada dibeberapa tempat.
7. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik itu materi maupun manfaatnya.

Syarat-syarat gadai yang diungkapkan diatas menggambarkan secara umum mengenai syarat-syarat *rahn*. Namun pada kenyataanya, para ulama tidak sepakat dalam memberikan syarat-syarat *rahn*, sehingga terjadi perkembangan dalam berbagai versi yang menyangkut kategori yang dapat dimasukkan sebagai syarat-syarat *rahn*. Adapun syarat-syarat *rahn* yang dimaksudkan akan dikemukakan pendapat dari para imam mazhab sebagai berikut:

1. Pendapat ulama mazhab Maliki

Pendapat ulama dari kalangan mazhab Imam Malik berkenaan dengan syarat-syarat *rahn* terdiri dari 4 (empat) bagian sebagai berikut:[[72]](#footnote-72)

1. Bagian yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melakukan akad, yaitu pihak *rahin* dan pihak *murtahin*. Syarat ini mengharuskan bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi hukum gadai harus adanya 2 (dua) orang yang memenuhi keabsahan akad dalam jual beli yang tetap (mengikat). Jika akad dilakukan oleh seorang anak yang masih *mumayyiz*, maka salah satunya dan/atau keduanya maka akadnya tetap sah tetapi tidak mengikat. Kecuali, jika anak *mummayyiz* yang melakukan akad tersebut diizinkan oleh walinya.
2. Bagian yang berkaitan dengan *marhun* (barang gadai). Syarat ini mengharuskan barang yang digadaikan adalah barang yang juga sah bila diperjualbelikan. Oleh karena itu, tidak boleh menggadai barang-barang yang tidak suci (najis) dan barang-barang lainnya yang dalam hukum jual beli juga dilarang.
3. Bagian yang berkaitan dengan *marhun bih* (uang yang dipinjamkan). Syarat ini mengharuskan utang sudah tetap, baik pada saat itu maupun di masa yang akan datang. Adapun hal yang dimaksudkan dalam hal ini dapat diungkapkan sebagai contoh tentang sahnya akad gadai pada *al-ju’lu* (pengupahan), yakni pemberian upah dari seseorang kepada orang lain atas jasanya.
4. Bagian yang berkaitan dengan akad. Hal yang dimaksudkan adalah mengharuskan bahwa akad gadai hendaknya tidak menetapkan suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan gadai. Misalnya akad gadai yang menghendaki *marhun* harus dijual jika orang yang menggadaikan *(rahin)* tidak melunasinya.

Semua persyaratan *rahn* yang ditentukan oleh mazhab Maliki di atas, berdasarkan pada asas setiap barang yang sah untuk diperjual-belikan, maka sah pula digadaikan.[[73]](#footnote-73)

1. Pendapat ulama mazhab Hanafi

Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat gadai terbagi atas 3 (tiga), yaitu:

1. Syarat terjadinya akad *rahn,* yakni (1) *marhun* (barang gadai), yang berupa harta benda, dan (2) *marhun bihi* (utang), yang merupakan sebab terjadinya gadai.
2. Yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya akad *rahn,* yaitu (1) hendaknya berkaitan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akal, (2) tidak didasarkan pada waktu tertentu, (3) *marhun*(barang gadai) dapat dibedakan dari lainnya, (4) *marhun* (barang gadai) berada dalam kekuasaan penerima gadai, setelah diterima olehnya *(al-qabdh),* (5) *marhun*  (barang gadai) benar-benar kosong, (6) *marhun* (barang gadai) bukanlah barang yang bernajis (tidak suci), dan (7) *marhun* (barang gadai) bukan termasuk barang yang tidak bisa diambil manfaatnya,
3. Syarat tetapnya akad *rahn*. Akad *rahn* telah tetap bilamana *marhun* (barang gadai) diterima oleh *murtahin* (penerima gadai) dengan terjadinya *ijab* dan *qabul*.
4. Pendapat ulama mazhab Imam Maliki dan Syafi’i

Pendapat ulama dari mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi’i yang hanya menekankan ketentuan perihal gadai yang mempersyaratkan keabsahan barang gadai berdasarkan keabsahan barang yang diperjual-belikan. Pengikut dari kedua mazhab yang dimaksud mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat diterima atau dijual, dapat digadaikan, dihibahkan, atau disedekahkan. Karena itu, menurut mereka barang-barang seperti hewan ternak, hewan melata, hamba sahaya (budak), dinar, dirham, tanah, dan barang-barang lainnya selama itu halal diperjual-belikan, maka halal pula digadaikan.[[74]](#footnote-74)

Pendapat dari kalangan ulama Imam Syafi’i menekankan bahwa barang gadai harus berbentu barang yang berwujud, jika tidak demikian maka gadainya menjadi tidak sah. Oleh karena itu, menggadaikan manfaat benda seperti gadai menepati rumah sebagai jaminan, menurut pendapat mereka tidak sah.[[75]](#footnote-75) Karena itu pada umumnya baik pada mazhab Maliki, mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali menyepakati bahwa syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad gadai sehingga syarat tersebut diperbolehkan. Namun, bila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn* maka syarat yang demikian menjadi batal.

1. **Pemanfaatan barang gadaian**

Para ulama mempunyai perbedaan berkenaan pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat ulama Syafi’iyah

Menurut ulama Syafi’iyah seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai *(marhun)* adalah pemberi gadai *(rahin)* walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai *(murtahin)*.[[76]](#footnote-76) Dasar hukum hal dimaksud adalah hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW meriwayatkan: dari Abu Hurairah RA berkata bahwasanya Rasullah SAW bersabda, “barang jaminan itu dapat air susunya dan ditanggungi/dinaiki”.
2. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, dari Abi hurairah Nabi Muhammad SAW bersabda: “gadaian itu tidak menutup hak yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)”. (HR. Asy-Syafi’i dan Ad-Daruqtuni)
3. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, dari Umar bahwasanya Rasullah SAW bersabda: “hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya”. (HR. Al-Bukhari).

Berdasarkan ketiga dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa *marhum* hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap melekat pada *rahin*. Oleh karena itu, manfaat atau hasil dari *marhun* itu tetap berada pada *rahin* kecuali manfaat atau hasil dari *marhun* itu diserahkan kepada *murtahin*. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* yang mengakibatkan turun kualitas *marhun* tidak dibolehkan kecuali diizinkan oleh *rahn.*

1. Pendapat ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutipoleh Muhammad dan Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai *(murtahin)* hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut:

1. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena menguntungkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal itu diperbolehkan.
2. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadai diperuntukkan pada dirinya.
3. Jika waktu mengambil manfaat yang telah diisyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka terjadi batal.[[77]](#footnote-77)
4. Pendapat ulama Hambaliyah

Menurut pendapat ulama Hambaliayah, persyaratan bagi *murtahin* (penerima gadai) untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah (a) ada izin dari pemilik barang, dan (b) adanya gadai bukan karena menguntungkan.

Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai *khadam*. Akan tetapi apabila harta gadai itu berupa rumah, sawah, kebun dan semacamnya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.[[78]](#footnote-78)

Hal ini berdasarkan dalil hukum sebagai berikut: “barang gadai *(marhun dikendarai)* oleh sebab nafkahnya apabila digadaikan dan atas yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya”. (HR. Al-Bukhari). Hadis Nabi Muhammad SAW tersebut dijadikan dasar hukum kebolehan *murtahin* mengambil manfaat dari barang gadai *(marhun)*. Dari Muhammad bin Salamah bahwa Rasullah SAW bersabda: “apabila seekor kambing digadaikan maka yang menerima gadai boleh meminum susunya sesuai kadar memberi makannya, apabila ia meminum susu itu melebihi harga memberi nafkahnya maka ia termasuk riba”.

Kebolehan *murtahin* memanfaatkan harta benda gadai atas seizin pihak *rahin*, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk *marhun* didasarkan atas hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut: dari Abu Hurairah RA, berkata bahwasanya Rasullah SAW bersabda: “barang jaminan itu dapat ditanggung dan diperah susunya”. Dari Umar bahwasanya Rasullah SAW bersabda: “hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya”. (HR. Al-Bukhari).

1. Pendapat ulama hanafiyah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Alasannya adalah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

“Dari Abu Shalih dari abu Abu Hurairah RA berkata, bahwasanya Rasullah SAW bersabda: barang jaminan utang (gadai) dapat ditunggangi dan diperah susunya, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya, wajib menafkahi”. (HR. Al-Bukhari).

Menurut ulama Hanafiyah sesuai dengan fungsi dari barang gadai *(marhun)* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi pihak penerima gadai *(murtahin)*. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai *(murtahin)* maka berarti mengilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak penerima gadai *(rahin)*.[[79]](#footnote-79)

Mengenai hal tersebut Sayyid Sabiq mempunyai pendapat yang berbeda, menurutnya memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai tidak ubahnya *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat adalah riba, kecualibarang yang digadaikan berupa hewan ternak yang diambil susunya, dimana pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.[[80]](#footnote-80)

Maka berdasarkan beberapa pendapat ulama yang telah dikemukakan di atas, mempunyai dasar hukum yang sama, namun mempunyai penafsiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu suatu fungsi dari barang gadai *(marhun)* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai *(murtahin)* sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai *(murtahin)*. Namun, *rahin* (pemberi gadai) bila ingin memanfaatkan objek gadaian *(marhun)* harus seizin dengan penerima gadai *(murtahin)* selama utang pemberi gadai *(rahin)* belum dilunasi kepada penerima gadai *(murtahin)*.[[81]](#footnote-81)

1. **Berakhirnya akad *rahn* (gadai)**

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjiakan untuk pembayaran utang telah terlewati maka pihak pemberi gadai berkewajiban untuk membayar hutangnya, namun jika seandainya pihak penerima gadai tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaiannya, dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh pemberi gadai maka pihak penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa pihak pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.

Apabila pemegang gdaia telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata terdapat kelebihan uang dari yang seharusnya dibayar oleh pihak pemberi gadai, maka kelebihan uang tersebut harus diberikan kepada pihak pemberi gadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang pihak pemberi gadai, maka pihak penerima gadai masih mempunyai kewajiban untuk membayar kekurangannya tersebut.

Sayyid Sabiq menyatakan apabila di dalam perjanjian gadai terdapat klausula *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka objek gadai (agunan) tersebut dibolehkan untuk dijual. Argumentasi yang ajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang barang (objek) gadai untuk menjual barang gadai tersebut. Pendapat ini berbeda denga pendapat Imam As-Syafi’i yang memandang dicantumkannya klausula tersebut dalam perjanjian gadai adalah batal demi hukum.[[82]](#footnote-82)

Dahulu pada zaman tradisi Arab sebelum Islam datang, jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka hak kepemilikan atas barang gadi beralih kepada ke pihak pemegang gadai. Praktik semacam inilah yang kemudian dibatalkan oleh Islam. Hal ini tertuang dalam Hadis dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja’far: “bahwa seseorang yang menggadaikan rumah di Madinah untuk jangka waktu tertentu, namun nasabnya telah lewat, lalu pihak pemegang barang (objek gadai) menyatakan “bahwa ini rumahku”. Rasulullah SAW kemudian bersabda:

“Jangalah ia (pemegang gadai) menutup hak gadaian dari pemiliknya *(rahin)* yang menggadaikan, ia *(murtahin)* berhak memperoleh bagian dan dia *(rahin)* berkewajiban membayar *gharamahnya*” (HR. Asy-Syafi’i)

Hal ini disetujuai oleh Al-Jazari yang mengatakan bahwa jika *rahin* mensyaratkan barang gadaian tidak dijual ketika hutangnya jatuh tempo, maka *rahn* (gadai) menjadi batal. Begitu pula jika *murtahin* mensyratkan kepada *rahin* bahwa *marhun* menjadi milik *murtahin* jika *rahin* tidak membayar hutangnya maka ini juga tidak sah (batal).[[83]](#footnote-83) Hal ini didasari pada sabda Rasullah SAW: “*rahn* itu tidak boleh dimiliki, *rahn* itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya”. (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik).

Dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Barang yang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
2. *Rahin* membayara hutangnya.
3. Dijual dengan perintah Hakim atas perintah *rahin*.
4. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meski tidak ada persetujuan dari pihak *rahin.*

Ibnu Al Mundzir mengatakan: “semua orang yang alim sependapat, bahwa siapa saja yang menggadaikan sesuatu harta, kemudian dia melunasi sebagiannya, dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian barang gadaiannya (lagi), sesungguhnya yang demikian itu (masih) bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian lain dari haknya atau pemberi hutang membebaskan.[[84]](#footnote-84)

Jika *marhun* mengalami kerusakan karena keteledoran *murtahin*, maka *murtahin* wajib mengganti *marhun* tersebut. Tetapi jika bukan disebabkan oleh *murtahin* maka *murtahin* tidak wajib mengganti piutangnya tetap menjadi tanggungan *rahin*.

Jika *rahin* meninggal dunia atau pailit maka *murtahin* lebih berhak *(preferen)* atas *marhun* dari pada sama kreditur. Jika hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi piutangnya, maka *murtahin* memiliki hak yang sama bersama para kreditur terhadap harta peninggalan *rahin*.[[85]](#footnote-85)

1. **Teori Berlakunya Hukum di Indonesia**

Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia. Waktu penjajah Belanda datang di Indonesia (Hindia Belanda), mereka menyaksikan kenyataan bahwa di Hindia-Belanda sudah ada hukum yang berlaku, yaitu agama yang dianut oleh penduduk Hindia-Belanda, seperti Islam, Hindu, Budha dan Nasrani, di samping hukum adat bangsa Indonesia. Berlakunya hukum Islam bagi sebagian besar penduduk Hindia-Belanda, berkaitan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam setelah runtuhnya kerajaan Majapahit pada sekitar tahun 1518 Masehi. Menurut C. Snouck Hurgronje sendiri, bahwa pada abad ke 16 di Hindia-Belanda sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam, seperti di Aceh, Mataram, Banten dan Cirebon yang berangsur-angsur mengislamkan seluruh penduduknya.[[86]](#footnote-86)

Walaupun pada mulanya kedatangan Belanda (yang beragama Kristen Protestan) ke Hindia-Belanda tidak ada kaitannya dengan masalah (hukum) agama, namun pada perkembangan selanjutnya, berkaitan dengan kepentingan penjajah, akhirnya mereka tidak bisa menghindari terjadinya persentuhan dengan masalah hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi. Sehubungan dengan berlakunya hukum adat bagi bangsa Indonesia dan hukum agama bagi masing-masing pemeluknya, muncullah beberapa teori-teori hukum jauh sebelum Indonesia merdeka. Adapun beberapa teori hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Teori *Receptio in Complexu*

*Teori receptio in complexu* dipelopori oleh Salomon Kayzer dan Christian van den Berg tahun 1845-1925. Teori *receptio in complexu* menyatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam.[[87]](#footnote-87)

*Teori receptio in complexu* ini telah diberlakukan di zaman VOC *(Vereenigde Oostindische Compagnie)* sebagaimana terbukti dengan dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyeleaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai *Nederlandsch Indie*.

Contohnya, Statuta Batavia yang saat ini desebut Jakarta 1642 pada menyebutkan bahwa sengketa warisan antara pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipergunakan oleh rakyat sehari-hari. Untuk keperluan ini, D.W Freijer menyusun buku yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam.

1. Teori *Receptie*

Teori *receptie* dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Volenhoven pada tahun 1857-1936.[[88]](#footnote-88) Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronye agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Teori ini bertentangan dengan *Teori reception in complexu*. Menurut *teori Receptie*, hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam jika sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat mereka. Oleh karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam. Sebagai contoh *teori Receptie* saat ini di Indonesia diungkapkan sebagai berikut.

Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits hanya sebagian kecil yang mampu dilaksanakan oleh orang Islam di Indonesia. Hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits tidak mempunyai tempat eksekusi bila hukum yang dimaksud tidak diundangkan di Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana Islam belum pernah berlaku kepada pemeluknya secara hukum ketatanegaraan di Indonesia sejak merdeka sampai saat ini. Selain itu, hukum Islam baru dapat berlaku bagi pemeluknya secara yuridis formal bila telah diundangkan di Indonesia. Teori ini berlaku hingga tiba di zaman kemerdekaan Indonesia.

1. Teori *Receptie Exit*

Teori *receptie exit* diperkenalkan oleh Hazairin. Menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai suatu aturan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan *teori receptie* bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, *teori receptie* itu harus *exit* atau keluar dari tata hukum Indonesia.

Teori *receptie* bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah, Kemudian dipertegas di dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menurut teori *receptie exit*, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan pada hukum adat.[[89]](#footnote-89) Pemahaman demikian kebih dipertegas lagi, antara lain dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (pasal 2 ayat 1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompulasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

1. Teori *Receptie a Contrario*

Teori *receptie exit* yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib dengan memperkenalkan teori *receptie a contrario.* Teori *receptie a contrario* yang secara harfiah berarti lawan dari teori *receptie* yang menyatakan bahwahukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan denganagama Islam dan hukum Islam.[[90]](#footnote-90)

Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat Aceh merupakan adaptasi dan berpedoman dari ketetapan dari Al-Quran dan Hadist sehingga adat Aceh yang berlaku dalam masyarakat sebelum masuknya Islam yang dinilai bertentangan dengan fatwa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadits tidak dipakai.[[91]](#footnote-91) Sehingga hukum adat yang berada dalam masyarakat adat Aceh baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah yang disebut oleh Sayuti Thalib dengan teori *receptie a contrario*.[[92]](#footnote-92)

1. Teori Eksistensi

Sebagai kelanjutan dari teori *receptie exit* dan teori *reception a contrario*, menurut Ichtijanto S.A, muncullah teori eksistensi.[[93]](#footnote-93) Teori eksistensi adalah teori yang menerangkan adanya hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini, eksistensi atau keberadaan hukum Islam dan hukum nasional itu ialah:

1. Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya.
2. Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.
3. Ada, dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan teori eksistensi diatas, maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum nasional merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam merupakan bahan utama dari hukum nasional.

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**
2. **Gambaran umum Kabupaten Pidie Jaya, Aceh**

Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten baru di Aceh yang merupakan suatu pecahan dari Kabupaten Pidie. Menurut garis khatulistiwa, Kabupaten Pidie Jaya terletak pada 04˚06’- 04˚47’ LU, 95˚56’- 96˚30’ BT.

Gambar 1: Peta letak Kabupaten Pidie Jaya



Sumber:[https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Lokasi\_Aceh\_Kabupaten\_Pidie\_Jaya.svg](https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas%3ALokasi_Aceh_Kabupaten_Pidie_Jaya.svg)

Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Pidie Jaya berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ulim, Kecamatan Bandar Dua dan Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tangse, kecamatan Mane dan Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Glumpang Tiga, Kecamatan Glumpang Baro, dan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie.

Kabupaten Pidie Jaya dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Pidie Jaya dengan luas wilayah 1190.41 KM2 dan terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan, 34 (tiga puluh empat) Mukim, dan 222 Gampong.[[94]](#footnote-94)

Gambar 2: Peta administrasi Kabupaten Pidie Jaya



Sumber: Badan Pusat Stastistik Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016

Adapun 8 (delapan) kecamatan yang berada dalam Kabupaten pidie Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Nama Kecamatan, Jumlah Gampong, kemukiman dan luas Wilayah

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Jumlah Gampong** | **Jumlah Kemukiman** | **Luas Wilayah (KM2)** |
| 1 | Meureudu | 30 | 4 | 124,79 |
| 2 | Meurah Dua | 19 | 3 | 287,07 |
| 3 | Bandar Dua | 45 | 5 | 174,32 |
| 4 | Jangka Buya | 18 | 2 | 9,35 |
| 5 | Ulim | 30 | 5 | 41,75 |
| 6 | Trieng Gadeng | 27 | 5 | 79,37 |
| 7 | Pante Raja | 10 | 2 | 15,00 |
| 8 | Bandar Baru | 43 | 8 | 220,47 |
|  | Jumlah | 222 | 34 | 952,12 |

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie jaya, Tahun 2016.

1. **Lokasi penelitian**

Penelitian dengan judul “Rekontruksi perjanjian *gala* (gadai adat) pada masyarakat adat Aceh berdasarkan perspektif syariah” ini dilaksanakan pada Kemukiman Kuta Reuntang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Kecamatan Meurah Dua memiliki luas wilayah yaitu sebesar 287,07 KM2. Kecamatan Meurah Dua memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Melaka.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Meureudu. dan
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun.

Kecamatan Meurah Dua terbagi atas 3 (tiga) kemukiman, di mana tiap-tiap kemukiman terdiri beberapa *gampong* sebagaimana berikut, yaitu:

1. Kemukiman Kuta simpang yang terdiri dari Gampong Pante Beureune, Gampong Beuringen, Gampong Meunasah Jurong, Gampong Lueng Bimba dan Gampong Buangan.
2. Kemukiman Kuta Baroh terdiri atas Gampong Blang Cut, Gampong Blang, Gampong Dayah Husen, Gampong Meunasah Mancang, dan Gampong Dayah Kruet.
3. Kemukiman Kuta Reuntang terdapat Gampong Meunasah Raya, Gampong Meunasah Bie, Gampong Geunteng Gampong Meunasah Teungoh, Gampong Meunasah Kulam, Gampong Lancok, Gampong Seunong, Gampong Sarah Mane dan Gampong Lhok sandeng.

Keadaan geografis pada Kemukiman Kuta Reuntang berada dalam kawasan bentangan alam yang pada umumnya datar dan berbukit. Pada bagian yang datar terdapat ladang persawahan tadah hujan yang luas, dengan masa panen 2 (dua) kali dalam setahun, sedangkan dibagian perbukitan pada saat menunggu musim tanam padi ataupun saat menunggu masa panen padi para petani kembali ke *seunuboek* (kebun) untuk berkebun untuk merawat tanaman sawit, palawija dan lainnya.

Kemukiman Kuta Reuntang secara keseluruhan penduduk berjumlah 5.492 jiwa di mana terdiri atas penduduk Gampong Meunasah Raya 1029 jiwa (laki-laki 518 dan perempuan 511 jiwa), Gampong Meunasah Bie 1060 jiwa (laki-laki 513 dan perempuan 547 jiwa), Gampong Geunteng 289 jiwa (laki-laki 298 dan perempuan 333 jiwa), Gampong Meunasah Teungoh 546 (laki-laki 273 dan perempuan 273 jiwa), Gampong Meunasah Kulam 568 jiwa (laki-laki 302 dan perempuan 266 jiwa), Gampong Lancok 497 (laki-laki 244 dan perempuan 253 jiwa), Gampong Seunong 783 jiwa (370 laki-laki dan perempuan 413 jiwa), Gampong Sarah Mane terdiri atas 228 jiwa (laki-laki 109 dan perempuan 119 jiwa) dan Gampong Lhok sandeng terdiri atas 150 (laki-laki 82 dan perempuan 68 jiwa).

Dari 5.492 jiwa penduduk pada Kemukiman Kuta Reuntang dapat diketahui 55% berprofesi sebagai petani, 20% berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 10% berprofesi sebagai pedagang, 15% berprofesi sebagai buruh dan pegawai swasta.[[95]](#footnote-95) Melihat data di atas hampir sebagian besar masyarakat pada Kemukiman Kuta reuntang berprofesi sebagai petani sehingga dalam keadaan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat akan melakukan *gala-menggala* antar sesama. Sehingga dalam perjanjian *gala* dalam masyarakat Kemukiman Kuta Reuntang hampir seluruhnya menggunakan lahan pertanian atau perkebunan untuk dijadikan sebagai objek *gala* (barang agunan).[[96]](#footnote-96)

1. **Bentuk Pelaksanaan Perjanjian *Gala* dalam Masyarakat Adat Aceh**
2. **Sejarah perjanjian *gala* dalam masyarakat adat Aceh**

*Gala* merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau emas dengan menjadikan tanah atau barang-barang lainnya yang dianggap berharga sebagai objek jaminan (agunan). Kata *gala* pada beberapa daerah di Aceh mempunyai berbagai sebutan masing-masing dimisalkan pada daerah Aceh besar sering disebut dengan istilah *gala-geumala* atau *geumala*, di daerah Aceh selatan, Pidie dan Pidie jaya disebut dengan istilah *gala*, di Aceh Tamiang disebut dengan istilah *agun,* sedangkan di daerah Aceh Tenggara disebut dengan istilah *cinder.*[[97]](#footnote-97)

Perjanjian *gala* kurang lebih telah berada dan hidup dalam masyarakat adat Aceh sejak abad ke 17 (tujuh belas) dan masih berlangsung sampai dengan sekarang. *Gala* merupakan sebagai suatu perbuatan tolong-menolong antar sesama dalam kehidupan masyarakat, konsep tolong-menolong dengan konsep perjanjian *gala* terus berkembang dan diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga keeksistensian perjanjian *gala* masih terjaga dan berlangsung sampai saat ini.

Pada awal-awal perkembangannya perjanjian *gala* dalam masyarakat adat Aceh tempo dulu biasanya dilakukan secara lisan atau tidak tertulis, dengan anggapan bahwa apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak tersebut telah disepakat dan kedua belah pihak di anggap telah memahami tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban diantara mereka, sehingga dengan berlandaskan saling percaya antara sesama inilah menjadi suatu ciri khas dalam perjanjian *gala* menurut hukum adat di Aceh.[[98]](#footnote-98)

Seiring dengan berjalannya waktu perjanjian *gala* yang berada dalam masyarakat adat Aceh terus berkembang sehingga dalam perkembangannya perjanjian *gala* juga ikut dipengaruhi oleh budaya luar yang akibat kemajuan teknologi dan perubahan alur pikir masyarakat. Pengaruh-pengaruh tersebut akhirnya membawa perubahan yang bersifat positif dan negatif kepada beberapa kegiatan masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi.

Perjanjian *gala* sampai sekarang masih diminati oleh masyarakat adat Aceh dikarenakan dalam mekanisme perjanjian *gala* dianggap lebih mudah dan tidak perlu adanya syarat-syarat tertentu yang dirasa terbelit-belit seperti di pengadaian, bank atau lembaga keuangan lainnya terutama ketika berada dalam keadaan kebutuhan finansial yang sangat mendesak.

Terdapat beberapa alasan-alasan tertentu yang menyebabkan pihak pemberi *gala (urueng peugala)* menggalakan hartanya tersebut agar dapat terpenuhinya kebutuhan mendesak yang relatif besar seperti:[[99]](#footnote-99)

1. Untuk keperluan pernikahan anak.

Pada masyarakat Aceh apabila ingin mengadakan resepsi pernikahan sangat membutuhkan kebutuhan uang yang sangat besar ataupun untuk memperbaiki atau membangun rumah tempat tinggal keluarganya untuk menyambut menantu nantinya, karena pada adat masyarakat Aceh menyambut mempelai pria dirumah mempelai perempuan saat awal pernikahan dan menetap bersama-sama dengan keluarga mempelai perempuan sampai mempunyai keturunan pertama.

1. Untuk biaya pengobatan keluarga.

Keperluan untuk mendapatkan biaya pengobatan keluarga yang sedang mengalami sakit yang parah yang mengharuskannya adanya perawatan langsung *(opname)* di rumah sakit.

1. Untuk kebutuhan sekolah anak.

Untuk memenuhi kebutuhan sekolah bagi anak-anaknya terkadang membutuhkan uang yang begitu besar, kebutuhan uang yang begitu besar biasanya untuk memenuhi biaya iuran SPP, biaya kuliah kerja nyata (KKN), biaya menyelesaikan kuliah seperti biaya penulisan skripsi, sidang sarjana dan wisuda.

1. Untuk keperluan menambah modal usaha.
2. Keperluan bekal perjalanan selama perjalanan merantau untuk mencari pekerjaan baru di luar daerah, dan
3. Keperluan finansial yang dirasakan sangat mendesak lainnya.

Sedangkan faktor yang menjadi penyebab saudara, keluarga dekat atau masyarakat khususnya penerima *gala (urueng teurimong peugala)* bersedia menerima *gala* dikarenakan dengan beberapa alasan sebagai berikut:[[100]](#footnote-100)

1. Semata-mata atas dasar tolong-menolong antara sesama, selain bisa membantu juga mengaharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT.
2. Ingin memelihara dan menjaga hubungan kekeluargaan, kekerabatan yang baik dan harmonis antar sesama, karena bagi masyarakat adat Aceh khususnya apabila ada keluarga atau tetangga yang ingin menggalakan harta bendanya apabila tidak membantu antara sesama akan terasa tidak enak dan sangat susah untuk ditolak.

Maka berdasarkan faktor-faktor di atas, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bersifat mendesak, pihak yang mengalami kesulitan dalam hal ini adalah pemberi *gala (urueng peugala)* mendiskusikan terlebih dahulu antar keluarga untuk memusyawarkan mengenai barang yang ingin digalakan. Musywarah ini dianggap perlu dikarenakan apabila nantinya diantara keluarga atau masyarakat segampongnya itu tidak bersedia sanggup untuk menerima jaminan terhadap benda yang akan digalakan tidak menyalahi aturan *hak langgeih*. *Hak langgeih* mengatur peralihan hak milik atas tanah kepada orang diluar gampong itu dilarang.[[101]](#footnote-101) Setelah adanya putusan antara keluarga barulah pihak pemberi *gala (urueng peugala)* mencari atau mendatangi sanak saudara yang dianggap mampu (mapan) dari segi ekonomi untuk memintakan pinjaman berupa uang atau emas dengan jaminan berupa sepetak tanah atau benda yang lain yang dianggap bernilai untuk digalakan.

Setelah adanya kesepakatan antar kedua belah pihak, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian *gala* pada umumnya hanya memuat judul (keterangan surat), pembukaan, identitas serta alamat dari pihak pemberi *gala (urueng peugala)* dan pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)*, letak objek yang digalakan, keterangan dari barang agunan dan penutup yang disertai dengan tanda tangan dari pihak pemberi *gala (urueng peugala)* dan pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* yang melakukan perjanjian *gala*, diikuti dengan tanda tangan dari saksi dan keuchik *gampong* setempat, dan selanjutnya diikuti dengan serah terima dan ijab kabul dari kedua belah pihak di mana pihak pemberi *gala (urueng peugala)* menyerahkan tanahnya atau barang berharga lainnya untuk dijadikan sebagai jaminan *gala* (barang agunan)kepada pihak penerima *gala (urueng trimong gala)* disertai dengan penyerahan hak pakai, sedangkan dipihak penerima *gala (urueng trimong gala)* menyerahkan uang dengan kesepakatan yang dipenuhi sebagaimana telah diperjanjikan antara keduanya dalam bentuk tunai *(cash)*.

Pada pelaksanaan perjanjian *gala*, pemilik harta atau disebut dengan pemberi *gala (urueng peugala)* menyerahkan hak pakai dan penguasaan atas objek *gala* (benda agunan) kepada orang yang memberi pinjaman atau biasa disebut penerima *gala (urueng teurimong gala)* untuk menggunakan harta galaan sebagai objek *gala* (agunan) selama pemilik belum menebusnya.

Selama berlangsungnya perjanjian *gala* barang jamiman berada dalam penguasaan penerima *gala (urueng teurimong gala)* maka selama objek *gala* (barang agunan) belum ditebus oleh pihak pemberi *gala (urueng peugala)* maka pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* berhak untuk menikmati hasil dari objek *gala* (barang agunan) dikarenakan pemanfaatan atas objek *gala* merupakan suatu bentuk balas jasa dari pihak pemberi *gala (urueng peugala)* atas uang atau emas yang dipinjamkan oleh pihak penerima *gala (ueureng teurimong gala)*. Maka berdasarkan adanya anggapan suatu bentuk balas jasa oleh karena itulah di dalam surat perjanjian *gala* tidak menyebutkan klausula batas waktu penebusan.[[102]](#footnote-102)

Berakhirnya suatu perjanjian *gala* dalam masyarakat adat Aceh adalah ketika objek *gala* (barang agunan) tersebut telah ditebus, dalam hukum adat Aceh adanya pepatah yang mengatakan *“lheuh ngui payah ta pulang, miseu utang payah ta bayeu, akhe dari janji gala ngon teuboh”.* Yang artinya suatu perjanjian pinjam-meminjam baru dianggap berakhir apabila barang yang yang dipinjam tersebut telah dikembalikan, begitu juga dengan perjanjian utang baru akan dianggap telah berakhir apabila telah dibayar dan perjanjian *gala* baru dianggap selesai (berakhir) apabila objek *gala* (barang agunan) telah ditebus.

1. **Unsur-unsur dalam perjanjian *gala***

Dalam pelaksanaan perjanjian *gala* dalam masyarakat adat Aceh pada umumnya haruslah memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:[[103]](#footnote-103)

1. Adanya kesepakatan dari para pihak untuk melakukan perjanjian *gala.*

Agar bisa terlaksananya suatu perjanjian *gala* terlebih dahulu harus adanya suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Makna sepakat dalam perjanjian adat ditandai dengan adanya pelepasan hak milik secara sukarela dan disertain serah terima (*ijab-kabul)* oleh kedua belah pihak. Bagi pihak pemberi *gala (urueng peugala)* untuk melepaskan hak pakai atas tanah atau benda lain yang menjadi objek *gala* kepada penerima *gala (urueng teurimong gala)* dan di pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* menyerahkan emas atau uang bagi pihak pemberi *gala (urueng peugala)* sampai ditembusnya kembali objek *gala* oleh pihak pemberi *gala (urueng peugala)*.

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian *gala* adalah *pihak* pemberi *gala (urueng peugala)* dan penerima *gala (urueng teurimong gala)* yang secara langsung menimbulkan perikatan yang berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang didasarkan pada suatu tanggung jawab keperdataan.

1. Adanya itikad baik dari para pihak

Dalam pelaksanaan perjanjian *gala* yang dilakukan oleh pihak penerima *gala* *(urueng peugala)* dan pihak penggala (pemberi gala) haruslah adanya suatu itikad baik untuk menolong. Dengan adanya itikad baik tersebut dalam perjanjian *gala* akan menghindarkan para pihak dari unsur-unsur penindasan atau mencari keuntungan bagi sebelah pihak.

1. Adanya keterlibatan pihak aparatur *gampong* dan saksi-saksi yang mengetahui dalam pelaksanaan perjanjian *gala.*

Keterlibatan aparatur *gampong*  dan saksi-saksi haruslah ada lebih dari satu orang, atau minimal adalah dua orang. Aparatur *gampong* dan saksi yang dilibatkan haruslah yang menguasai dan memahami mekanisme serta pelaksanaan perjanjian *gala*. Aparatur *gampong* boleh seorang *keuchik* (kepala desa), *teungku imum, tuha peut,* tokoh-tokoh adat, atau orang-orang yang dapat dipercaya.

Di sisi lain adanya aparatur *gampong* dan saksi-saksi ini menjadi sebagai pemberi keterangan yang berkaitan dengan alat bukti apabila nantinya dalam perjalanan dan pelaksanaan perjanjian *gala* nantinya mengalami sengketa antara kedua belah pihak dikemudian hari.

1. Objek yang digalakan haruslah berstatus hak milik dari pemberi *gala (urueng peugala)*

Bentuk pelaksanaan perjanjian *gala* yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat Kemukiman Kuta Reuntang pada umumnya jika pemberi *gala (urueng peugala)* ingin menggalakan harta bendanya maka pada objek galaan (barang agunan) haruslah melekat hak kepemilikan dan objek pada suatu perjanjian *gala* haruslah bebas dari sengketa. Pada umunya yang dijadikan objek *gala* pada masyarakat Kemukiman Kuta Reuntang adalah tanah sawah *(umoeng blang),* tanahperkebunan *(seunubok)* dan kebun (*lampoh)* yang masih bersifat produktif.[[104]](#footnote-104)

1. Adanya penyerahan uang atau emas yang diserahkan oleh pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)*

Penyerahan uang atau emas murni (24 karat) secara kontan *(cash)* yang diberikan penerima *gala (urueng teurimong gala)* ke pihak pemberi *gala (urueng peugala)* sesaat setelah *ijab-kabul* (serah terima) dihadapan para saksi-saksi.

1. Adanya kewajiban penebusan kembali oleh pihak pemberi *gala (pemberi gala)*

Pada perjanjian *gala* terdapat kewajiban menebus objek *gala* (barang agunan) oleh pihak pemberi *gala (ureung peugala)* saat perjanjian *gala* jatuh tempo pelunasan. Penebusan yang dilakukan tersebut harus sesuai dengan sejumlah penyerahan uang atau emas sebagaimana telah tertera di dalam surat perjanjian *gala*.

Maka berdasarkan unsur-unsur di atas terdapat 2 (dua) bentuk persyaratan yang berada pada suatu perjanjian *gala* yaitu:

1. Syarat subjektif

Syarat subjektif merupakan unsur-unsur yang berkenaan dengan orang-orang atau subjek yang mengadakan atau melaksanakan suatu perjanjian *gala*. Hal tersebut meliputi adanya para pihak, adanya itikad baik dalam melakukan atau melaksanakan suatu perjanjian *gala* dan adanya saksi-saksi ketika melaksanakan perjanjian *gala*.

1. Syarat objektif.

Pada syarat objektif merupakan adanya unsur-unsur yang berkenaan dengan benda-benda yang menjadi suatu objek *gala* berupa objek *gala* di dalam suatu perjanjian *gala* dalam masyarakat adat Aceh pada umumnya adalah rumah, surat-surat berharga, tanah sawah *(umoeng blang),* tanah perkebunan *(seuneubok),* kebun *(lampoh)*, tambak ikan *(neuheun)* dan barang-barang lain yang dianggap mempunyai nilai jual (berharga) yang merupakan barang seutuhnya dimiliki oleh pihak pemberi *gala (urueng peugala).*

1. **Asas-asas dalam perjanjian *gala***

Barang agunan atau objek *gala* harusnya merupakan barang yang seutuhnya milik pihak pemberi *gala (urueng peugala).* Sebagaimana telah dibahas pada halaman sebelumnya bahwa yang dapat menjadi suatu objek *gala* di dalam suatu perjanjian *gala* dalam masyarakat adat Aceh pada umumnya adalah rumah, surat-surat berharga, tanah sawah *(umoeng blang),* tanah perkebunan *(seuneubok),* kebun *(lampoh)*, tambak ikan *(neuheun)* dan barang-barang lain yang dianggap mempunyai nilai jual (berharga).

Dalam praktek perjanjian *gala* dalam masyarakat Kemukiman Kuta Reuntang pada umumnya terdapat beberapa asas-asas umum di dalam suatu transaksi *gala* sebagaimana berikut:[[105]](#footnote-105)

1. Asas tolong-menolong

Pada kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Kemukiman Kuta Reuntang tolong menolong antar sesama menjadi suatu perbuatan yang wajib dan mulia di mata Allah, jika seseorang menolong satu sama lain apabila salah seorang diantaranya mengalami musibah atau suatu kebutuhan yang bersifat sangat mendadak sehingga dengan terpaksa ia meminta bantuan kepada saudara, kerabat atau orang-orang yang mempunyai kemampuan yang lebih dari cukup yang maksudnya mapan baik dari segi sosial atau ekonomi. Hal ini didasari atas suatu prinsip dasar tolong menolong antar sesama di mana bahwa dalam setiap pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat tidak mungkin selalu bergantung pada diri sendiri, tentunya dalam kehidupan akan tentu memerlukan bantuan antara satu dengan yang lain, baik itu antara masyarakat miskin dan kaya begitu juga sebaliknya.

Tentunya apabila melihat suatu praktek perjanjian *gala* dalam masyarakat adat Aceh, transaksi *gala* berlandasakan asas tolong-menolong dikarenakan adanya penyerahan dari para pihak secara sukarela, pihak pemberi *gala* *(urueng peugala)* menyerahkan hak pakai terhadap objek galaannya kepada pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* sedangkan disisi lain adanya penyerahan uang atau emas sebanyak harga yang telah disepakati dari pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* kepada pihak pemberi *gala (urueng peugala)*

1. Asas kepercayaan

Pada tiap-tiap suatu transaksi *gala* antara pihak pemberi *gala (urueng peugala)* dan penerima gala *(urueng teurimong gala)* haruslah adanya unsur saling percaya antara satu sama lain. Maksudnya apabila pemberi *gala (urueng peugala)* menyerahkan sejumlah uang kepada pemberi *gala* pada suatu waktu tertentu akan ditebus kembali oleh pihak pemberi *gala (urueng peugala)* dan pihak penerima gala *(urueng teurimong gala)* berhak memperoleh kembali uangnya sebagai uang tebusan. Karena dengan adanya barang agunan (objek *gala*) diharapkan agar pihak pemberi gala *(urueng peugala)* dapat menebus kembali objek jaminan yang telah digalakan tersebut.

1. Asas konsesualisme dan kongkrit *(riil)*

Dalam hukum adat sahnya suatu perjanjian disamping adanya suatu kesepakatan dari kedua belah pihak tentunya harus diikuti dengan adanya suatu tindakan yang kongkrit *(riil)*, karena pada dasarnya kesepakatan saja tanpa adanya suatu perjanjian tanpa diikuti oleh suatu tindakan yang nyata akan dianggap suatu perjanjian itu tidak ada (tidak nyata). Berbeda halnya dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana syarat sahnya suatu perjanjian harus terpenuhinya 4 (empat) syarat yaitu adanya kesepakatan, kecakapan untuk berbuat, hal tertentu dan kausal yang halal.

Agar dapat dikatakannya suatu perbuatan yang nyata *(riil)* dalam perjanjian *gala* terlebih dahulu sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak di mana pihak pemberi *gala (urueng peugala)* menyerahkan objek *gala* (agunan) dan pihak penerima gala *(urueng teurimong gala)* secara bersamaan melakukan penyerahan sejumlah uang atau emas yang telah disepakati atau dibutuhkan oleh pihak pemberi *gala (urueng peugala)* dan kemudian disertai serah terima *(ijab-kabul)* oleh kedua belah pihak.

1. Asas musyawarah

Asas musyawarah dalam suatu perjanjian *gala* ini berguna jika nantinya terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Apabila nantinya terdapat perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaiaan dilakukan melalui metode musyawarah dan mufakat sebagai suatu upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu kepada keadaan semula yaitu suatu keadaan yang hidup rukun dan damai secara menyeluruh sesuai kehendak bersama dalam kehidupan bermasyarakat.[[106]](#footnote-106)

Dengan adanya musyawarah dan mufakat diharapkan adanya suatu keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Sebab dalam penyelesaian perkara dalam masyarakat hukum adat bukan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang bersalah, akan tetapi dengan adanya peselisihan antara para pihak, maka para ketua adat dalam hal ini aparatur gampong baik terdiri dari *Imum Mukim dan Keuchik* mendudukkan kembali kedua belah pihak pada posisi sediakala yang rukun, laras dan kembali dalam keadaan yang damai.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, asas-asas sebagaimana telah disebutkan di atas, asas-asas tersebut tidak hanya berlaku pada perjanjian *gala* semata, akan tetapi asas-asas tersebut juga berlaku bagi perjanjian-perjanjian yang lainnya dikarenakan pada umumnya pada tiap kasus sengketa adat di Aceh selalu di tempuh dengan metode musyawarah dan mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan tujuan agar para pihak dapat kembali rukun seperti awal.

1. **Hak dan kewajiban dalam perjanjian *gala***

Transaksi *gala* merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara pihak pemberi *gala (urueng peugala)* dan penerima *gala (urueng teurimong gala)* terhadap suatu objek *gala* (agunan). Hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut pada hakikatnya adalah merupakan suatu bentuk hak dan kewajiban bagi kedua pihak tersebut.

Adapun hak dari kedua belah pihak tersebut adalah sebagai berikut:[[107]](#footnote-107)

1. Hak bagi pihak pemberi *gala (urueng peugala)*
2. Pemberi *gala (urueng peugala)* berhak untuk meneriman uang gala dari penerima *gala (urueng teurimong gala)*.
3. Pemberi *gala (urueng peugala)* berhak menebus objek *gala* (agunan) apabila sudah tibanya waktu penebusan.
4. Pemberi *gala (urueng peugala)* berhak menuntut penerima *gala (urueng teurimong gala)* apabila nilai dari objek *gala* mengalami kemerosotan yang diakibatkan oleh pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)*.
5. Pemberi *gala (urueng peugala)* berhak memperoleh kembali objek galaanya apabila perjanjian *gala* tersebut sudah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana terdapat didalam Pasal 7 Perpu 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, akan tetapi pada pelaksanaannya berakhirnya *gala* dengan adanya peraturan tersebut tidak pernah terjadi (tidak berlaku) dikarenakan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang adanya peraturan tersebut.
6. Hak bagi pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)[[108]](#footnote-108)*
7. Penerima *gala (urueng teurimong gala)* berhak untuk menguasai objek  *gala* (agunan) selama perjanjian *gala* berlangsung.
8. Penerima *gala (urueng teurimong gala)* berhak untuk memungut hasil dan menikmatinya.
9. Penerima *gala (urueng teurimong gala)* berhak untuk menggalakan kembali objek *gala* (agunan) kepada pihak ketiga jika sangat memerlukan uang.
10. Penerima *gala (urueng teurimong gala)* berhak menerima kembali uang *galaan* tersebut dari pemberi *gala (urueng peugala)*.
11. Penerima *gala (urueng teurimong gala)* berhak membuat perjanjian bagi hasil atau sejenisnya kepada pihak ketiga.

Sedangkan kewajiban antara pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* dan pihak pemberi *gala (urueng peugala)* adalah sebagai berikut:[[109]](#footnote-109)

1. Kewajiban bagi pemberi *gala (urueung peugala).*
2. Pemberi *gala (urueung peugala)* berkewajiban menyerahkan benda *gala* kepada pihak penerima *gala* *(urueng teurimong gala)* setelah serah terima *(ijab-kabul)*.
3. Pemberi *gala (urueung peugala)* berkewajiban mengembalikan uang *gala* kepada penerima *gala* *(urueng teurimong gala)* sejumlah dengan uang atau emas yang diterima saat awal perjanjian *gala*.
4. Kewajiban bagi pihak penerima *gala (urueng teurimong gala).[[110]](#footnote-110)*
5. Penerima *gala (urueng teurimong gala)* berkewajiban memelihara objek *gala* (barang agunan)dan bertanggung jawab atas kemerosotan harga atau nilai dari objek *gala* (barang agunan).
6. Penerima *gala (urueng teurimong gala)* berkewajiban memberitahukan pihak pemberi *gala (urueng peugala)* apabila objek *gala* ingin dialihkan, atau telah dikembalikan dari pihak ketiga.
7. Penerima *gala (urueng teurimong gala)* berkewajiban mengembalikan objek *gala* kepada pemberi *gala (urueng peugala)* setelah dilakukan pelunasan (penebusan), dan perjanjian *gala* tersebut sudah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana terdapat didalam Pasal 7 Perpu 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Pengembalian objek *gala* kepada pihak pemberi *gala* juga jarang dilakukan dikarenakan tidak taunya pemberlakuan perpu tersebut.
8. **Berakhirnya perjanjian *gala* dalam masyarakat adat Aceh**

Berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Kemukiman Kuta Reuntang berakhirnya suatu perjanjian *gala* tidak hanya cukup dengan pengembalian penebusan objek *gala* (agunan) oleh pemberi *gala (urueng peugala)* kepada pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* dengan sejumlah uang atau emas secara tunai saat awal terjadinya perjanjian *gala*.

Berakhirnya haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, para pihak antara pihak pemberi *gala (urueng peugala)* dan pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* saat hendak mengakhir suatu perjanjian *gala* haruslah dilakukan di depan kepala desa *(keuchik)* dan para saksi-saksi disertai penyerahan uang atau emas oleh pihak pemberi *gala (urueng peugala)* kepada pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* sedangkan pada pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* menyerahkan kembali surat bukti perjanjian *gala* kepada pihak pemberi *gala (urueng peugala)*.[[111]](#footnote-111)

Berakhirnya suatu perjanjian *gala* pada masyarakat Kemukiman Kuta Reuntang dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah sebagai berikut:[[112]](#footnote-112)

1. Berakhirnya suatu perjanjian *gala* karena adanya penebusan oleh pihak pemberi *gala (urueng peugala).*

Pada umunya berakhirnya suatu perjanjian *gala* dikarenakan pihak pemberi *gala (urueng peugala)* melakukan penebusan kepada pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* terhadap objek galaannya (barang agunan). Maka dikeranakan telah dilakukan penebusan dengan otomatis perjanjian *gala* berakhir dengan sendirinya dan hak pakai yang sebelumnya berada pada pihak pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* juga ikut berakhir. Sedangkan pihak pemberi *gala (urueng peugala)* berhak memiliki hartanya kembali dengan seutuhnya.

1. Berakhirnya batas waktu berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian *gala*.

Berakhirnya perjanjian *gala* karena adanya klausula batas waktu yang dimuat di dalam surat perjanjian *gala*. Dalam hal ini pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* berhak terlebih dahulu memberi tahu perihal berakhirnya batas waktu perjanjian *gala* kepada pihak pihak pemberi *gala (urueng peugala)* maka apabila nantinya pihak pemberi *gala (urueng peugala)* tidak mampu menebus maka pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* berhak untuk memperpanjang masa *gala* atau mengalihkan objek *gala* (agunan) kepada pihak ke 3 (tiga) atas persetujuan pihak pemberi *gala (urueng peugala)*, namun apabila nanti tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak antara pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* dan pemberi *gala (urueng peugala),* maka pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* berhak menjual objek *gala* (agunan) untuk membayar atau menebus utang pihak pemberi *gala (urueng peugala).*

1. Terjadinya peralihan kepada pihak ke 3 (tiga).

Apabila ditengah pelaksanaan perjanjian *gala* penerima *gala (urueng teurimong gala)* memerlukan uang dalam jumlah besar dan mendesak, maka penerima *gala (urueng teurimong gala)* berhak melakukan peralihan kepada pihak ke 3 (tiga) atas persetujuan pihak pemberi *gala (urueng peugala)*.

1. Terjadinya penyerahan secara suka rela dari pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)*.

Berakhirnya perjanjian *gala* karena penyerahan secara sukarela yang dilakukan pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* kepada pihak pihak pemberi *gala (urueng peugala)* berdasarkan alasan-alasan tertentu, dimisalkan dengan alasan selama objek *gala* (agunan) karena hasil dari panen terhadap hasil perkebunan dan di sawah sudah mencukupi untuk biaya pelunasan hutang-hutangnya.

1. Objek yang digalakan musnah karena bencana alam.

Berakhirnya perjanjian *gala* yang disebabkan oleh adanya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, longsor dan banjir dan sebagainya dengan otomatis berakhirnya suatu perjanjian gala dan pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* tidak dapat menuntut pihak pemberi *gala (urueng peugala)* dengan alasan apapun. Akan tetapi apabila musnahnya objek *gala* hanya sebahagian maka hubungan hukum antara kedua belah pihak tetap berlaku.

1. **Proses penyelesaian sengketa gala dalam masyarakat adat Aceh.**

Proses penyelesaian sengketa adat yang ada di Aceh di dukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang sudah sangat memandai. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengatur secara tegas mengenai penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari *gampong* dan mukim.

Adapun aturan-aturan hukum dan peraturan utama yang mengatur tentang pelaksanaan adat di Aceh adalah:

1. Pasal 3 dan 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang menyatakan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk menghidupkan adat sesuai dengan syariat Islam.
2. Pasal 98 ayat (2) undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
3. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat menegaskan bahwa “lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat”. Sedangkan tugas lembaga adat di atur dalam pasal 5 menyebutkan bahwa lembaga adat berfungsi untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan, dan di dalam Pasal 6 dan 10 menyebutkan bahwa lembaga adat dapat menjadi hakim perdamaian dan diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus.
4. *Qanun* Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan wewenang kepada mukim untuk memutuskan dan atau menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan istiadat.
5. *Qanun* Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menegaskan tugas dan kewajiban pemerintahan gampong adalah menyelesaikan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat dan bersama dengan *tuha peuet* dan *imum meunasah* menjadi hakim perdamaian.

Peradilan adat Aceh pada umumnya tidak membedakan antara perkara pidana dan perdata. Adapun kewenangan dari peradilan adat Aceh mencakup persoalan:[[113]](#footnote-113)

1. Perselisihan dalam rumah tangga.
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh.*
3. Perselisihan antar warga.
4. *Khalwat* meusum.
5. Perselisihan tentang hak milik.
6. Pencurian di dalam keluarga (pencurian ringan).
7. Perselisihan harta *seuhareukat*.
8. Pencurian ringan.
9. Pencurian ternak.
10. Pelanggaran adat tentang ternak.
11. Persengketaan di laut.
12. Persengketaan di pasar.
13. Penganiayaan ringan.
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komuditas adat).
15. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik.
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan).
17. Ancam-mengancam.
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat.

Lembaga peradilan adat Aceh diselenggarakan oleh pemerintahan *gampong* dan *mukim*. Dari segi aspek dan fungsi lembaga peradilan adat dijadikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat, penyelenggara peradilan adat di tingkat *gampong* atau *mukim* terdiri atas *keuchik* sebagai pemimpin sidang, *imum meunasah* sebagai anggota sidang, *tuha peut* sebagai anggota sidang, ulama atau cendikiawan sebagai anggota sidang dan sekretaris desa sebagai panitera.[[114]](#footnote-114)

Gambar 3: Tata Letak Peradilan Adat Gampong

Sumber: Anonim, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh,* Banda Aceh, Majelis Adat Aceh, 2008.

Alur penyelesaian sengketa pada masyarakat adat Aceh haruslah melalui tahapan-tahapan tertentu, jika persengketaan perdata yang merugikan para pihak maka tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut[[115]](#footnote-115):

1. Pada tahapan awal harus adanya pelaporan dari pihak yang mengalami kerugian (korban) atau kedua belah pihak yang bersengketa kepada kepala dusun atau *petuwa jurong* (ketua lorong) ditempat terjadi persengketaan atas dasar asas teritorial. Akan tetapi dalam pelaksanaannya juga memungkinkan pihak yang mengalami kerugian atau para pihak yang mempunyai sengketa juga dibenarkan langsung untuk melaporkan perihal pokok perkara yang disengketakan langsung kepada *keuchik*.
2. Ketika *keuchik* telah menerima laporan dari ketua dusun, *petuwa jurong* (ketua lorong) atau dari pada pihak maka *keuchik* membentuk satu musyawarah secara internal antar aparatur gampong yang terdiri atas, Sekretaris *Gampong, Petuwa Jurong*, Kepala Dusun, *Imum Meunasah* untuk menentukan jadwal persidangan.
3. Sebelum dimulai acara persidangan, terlebih dulu adanya kewajiban bagi aparatur *gampong* untuk pendekatan musyawarah dengan para pihak yang bersengketa dengan tujuan agar dapat mengetahui pokok dari duduk perkara dari permasalahan yang disengketakan dan meminta persetujuan dari para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah dengan damai.
4. Jika adanya kesepakatan dari para pihak menyetujui untuk menyelesaikan perkara secara damai maka Sekretaris *Gampong* mengundang para pihak secara resmi untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal sebagaimana telah ditentukan.
5. Pada saat persidangan berlangsung maka para pihak dapat diwakili oleh wali ataupun sanak saudaranya yang dipercayai untuk dijadikan sebagai juru bicara.
6. Proses persidangan bersifat resmi dan terbuka untuk umum dan tempat pelaksanaannya dilaksakan di *meunasah*, mesjid ataupun tempat yang dianggap aman dan netral.
7. Forum persidangan bersifat formal secara adat dan sesuai dengan pola tata letak adat *gampong*.
8. Ketika dibuka dan berlangsung maka *keuchik* yang selaku ketua membuka sidang dan mempersilahkan para pihak atau juru bicara untuk menyampaikan permasalahannya yang kemudian dicatat oleh Sekretaris *Gampong* selaku panitera.
9. Setelah penyampaian permasalahan dari para pihak maka selanjutnya *keuchik* memberikan kesempatan kepada para saksi untuk memberikan kesaksian, sebelum memberikan kesaksian maka para saksi diambil sumpah terlebih dahulu.
10. Selanjutnya adalah adanya tanggapan dari ulama atau cendikiawan untuk menyampaikan solusi atau jalan keluar dari pokok perkera yang disengketakan.
11. Keuchik beserta seluruh anggota sidang memusyawarahkan putusan damai atas apa yang diberikan jika telah adanya kesepakan tentang jenis putusan damai yang akan diputuskan. Jika para pihak yang bersengketa menerima hasil putusan tersebut, maka sekretaris *gampong* selaku panitera membuat diktum putusan atau sering disebut surat perjanjian damai secara tertulis.
12. Jika salah satu pihak atau para pihak tidak setuju dengan putusan perdamaian, maka salah satu pihak atau para pihak dapat mengajukan banding ke tingkat *mukim* dengan membuat surat pernyataan atas ketidak setujuan dari para pihak terhadap putusan adat di tingkat *gampong* sehingga penyelesaian sengketa diajukan ke persidangan tingkat *mukim.*
13. *Keuchik* membaca putusan perdamaian dan meminta kepada para pihak untuk mentanda tangani akta perdamaian serta melaksanakan isi putusan itu dengan sungguh-sungguh.
14. Hasil putusan perdamaian dan salinnya diberikan kepada para pihak dan disimpan pada kantor *keuchik* atau *mukim* dan dijadikan sebagai arsip.
15. Setelah adanya putusan yang telah dispepakati dan diterima oleh para pihak maka pada petemuan berikutnya akan dilakukan pengeksekusian terhadap putusan melalui upacara perdamaian.

Proses penyelenggaran peradilan adat dan penyelesaian sengketa *gala* di Kemukiman Kuta Reuntang pada umumnya diselesaikan berdasarkan alur penyelesaian di atas dikarenakan pada umumnya masyarakat Kemukiman Kuta Reuntang beragama Islam maka penyelesaian sengketa di lakukan di mesjid atau *meunasah* (musalla) dan melibatkan para pihak, saksi-saksi, *keuchik, tuha peut, imum meunasah* dan para ulama, keluarga dari para pihak. Penyelesaian sengketa *gala* dalam masyarakat adat dilakukan dengan metode musyawarah (mediasi) sehingga dari hasil musyawarah tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai suatu keputusan bersama oleh para pihak.

 Sehingga dalam para penyelenggara peradilan adat nantinya dapat menghasilkan bentuk keputusan hukum adat atas keputusan damai yang telah ditetapkan. Keputusan tersebut ditetapkan dihadapan umum dan dihadiri oleh seluruh masyarakat *gampong,* para pihak yang berperkara serta keluarga dan orang tua *gampong*. Bila kedua belah pihak telah sepakat untuk tidak melakukan banding ke tahapan *mukim* dan puas dengan rumusan penetapan putusan maka saat hari yang ditetapkan dilakukan eksekusi melalui suatu upacara perdamaian di mesjid atau *meunasah* di hadapan umum. Pada saat pelaksanaan eksekusi putusan pada tahapan awal biasanya para pihak dilakukan upacara adat *peusijuek* atau disebut dengan istilah tepung tawar.

Pada masyarakat Aceh pada umumnya upacara *peusijuk* dianggap sebagai upacara tradisional dari beberapa simbol, salah satunya adalah simbol dari perestuan dan saling memaafkan dengan tujuan agar para pihak setelah pelaksanaan eksekusi dan berakhirnya perkara yang disengketkan tidak menyimpan dendam dan benci sehingga para pihak dapat rukun dan harmonis kembali dan tahap terakhir adalah eksekusi putusan. Tanggung jawab eksekutor putusan berada di tangan *keuchik*, pelaksanaan putusan eksekutor terhadap dilakukan di mesjid atau *meunasah* atau tergantung kesepakatan dari para pihak.[[116]](#footnote-116)

1. **Konsep Perjanjian *Gala* di Lihat dari Perspektif Syariah**
2. **Konsep perjanjian *gala* dan gadai syariah**

Perjanjian *gala* yang berada dalam masyarakat adat Aceh merupakan suatu perjanjian pinjam-meminjam yang dapat dipersamakan dengan suatu perjanjian gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor (pemberi gadai) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (penerima gadai) atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Gadai Syariah sering diidentikkan dengan *rahn* yang secara bahasa diartikan *al-tsubut wa al-dawam* (tetap dan kekal) sebagian Ulama *Luhgat* memberi arti *al-hab* (tertahan). Sedangkan definisi *rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebahagian utang dari benda itu.[[117]](#footnote-117)

Para ulama telah menyepakati bahwa perjanjian *gala (rahn)* hukumnya boleh dan tidak wajib karena pada sifat dari objek gadai (barang agunan) hanya merupakan jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Akan tetapi, jika kedua belah pihak saling mempercayai satu sama lain, maka jaminan mungkin tidak diperlukan. Hal ini tercermin dari firman Allah berikut: “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya)” (QS. Al-Baqarah: 283). Ayat ini juga memberikan tafsiran bahwasanya jaminan hanya disyaratkan jika tidak ada penulis di antara orang yang bertransaksi tersebut.

Dalam masyarakat adat Aceh perjanjian *gala* merupakan suatu perbuatan yang berlandaskan nilai-nilai *ta’awun* (tolong-menolong) antar sesama manusia. Konsep tolong-menolong juga didasari pada konsep kebersamaan bagi masyarakat adat Aceh adanya suatu anggapan membantu antar sesama yang menjadi sebuah perbuatan yang sangat mulia selain dimata Allah dan juga dimata manusia.[[118]](#footnote-118)

Pepatah Aceh menyebutkan *“Miseu ka pakat, tanoeh jeurat jeut tapeugala”* artinya kalau sudah adanya kesepakatan antar keluarga dan para pihak, tanah makam pun bisa di *gala*kan. Akan tetapi pada dasarnya tanah makam di masyarakat Aceh tidak boleh digadaikan karena tanah makam merupakan martabat keluarga jikalau pun adanya transaksi terhadap tanah makam maka dipercayai akan mendapatkan celaan dari masyarakat dan akan didatangkan bala (musibah) dari Tuhannya. Maka berdasarkan kata pepatah tersebut kebolehan suatu perjanjian *gala* haruslah didasarkan pada keterpaksaan akan kebutuhan biaya yang banyak dalam mendesak.[[119]](#footnote-119)

Perbuatan tolong menolong juga dianggap sebagai pengamalan terhadap firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 2 (dua) yang artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”, sehingga dengan alasan tersebut akan sangat tabu apabila seseorang yang mampu pantang menolak untuk membantu antar sesama di dalam kehidupan bermasyarakat dalam hal kebajikan.

1. **Batasan waktu dan penguasaan objek *gala* ditinjau dari aspek perekonomian Islam.**

Pada suatu sistem perekonomian di dalam Islam terdapat beberapa landasan yang menjadi konsep dasar sebagaimana berikut:

1. Pelarangan akan adanya suatu ketidakpastian atau *gharar*.
2. Adanya pelarangan riba.
3. Pelarangan judi (*maisir)*.
4. Pelarang adanya suatu penipuan *(tadlis).*
5. Pelarangan terhadap perdangangan atas suatu benda yang tidak *halal* seperti transaksi jual-beli senjata, minuman beralkohol barang yang tidak suci *(najis)* dan barang yang tidak boleh diperjual-belikan lainnya di dalam agama Islam.
6. Penggunaan prinsip bagi hasil.

Perjanjian gala digolongkan dalam suatu perbuatan *tabbaru’* artinya perjanjian gala merupakan salah satu perjanjian di dalam transaksinya tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba) dengan anggapan murni karena timbulkan atas dasar niat saling bantu-membantu antar sesama.[[120]](#footnote-120)

Terbitnya Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mengatur tentang batasan waktu gadai yang berobjekkan tanah pada alasannya tidak berlaku sebagai suatu patokan atas perjanjian *gala* dalam masyarakat Kemukiman Kuta Reuntang pada umumnya sehingga dalam pelaksaannya perjanjian *gala* baru dianggap selesai apabila pihak pemberi *gala (urueng peugala)* sudah menebus objek *gala* (agunan) pada pihak penerima *gala (urueng teurimong gala).*[[121]](#footnote-121)

Berdasarkan bentuk pelaksanaan perjanjian *gala* di atas tentunya akan dapat memberikan dampak-dampak perampasan (penindasan) bagi para pihak pemberi *gala*. Pada sisi lainnya pihak pemberi *gala (urueng peugala)* juga sulit untuk menebus kembali objek *gala* (agunan) dikarenakan objek *gala* (agunan) yang dulunya merupakan tempat utama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jika melihat konsep dasar sistem perekonomian Islam tentunya melarang adanya unsur ketidak pastian atau *gharar*. *Gharar* dalam bahasa Arab bermakna *al-khathr* (pertaruhan). [[122]](#footnote-122) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya. Sedangkan menurut Syaikh As-Sa’di, *al-gharar* adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidak jelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Sehingga, dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli *gharar* adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan (tanpa adanya batasan waktu yang jelas), pertaruhan, atau perjudian.[[123]](#footnote-123)

Adapun yang menjadi kaitan *gharar* dalam suatu perjanjian *gala* yang berkembang dalam kehidupan masyarakat adat Aceh yaitu tidak adanya batas waktu dalam hal berakhirnya perjanjian *gala.* Dalam syari’at Islam, jual beli gharar ini terlarang dikarenakan sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya:

Di dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Di dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda:

“Rasullah SAW melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar”*.

Larangan *gharar* dalam konsep perekonomi Islam bertujuan agar nantinya tidak adanya unsur ketidak pastian yang nantinya akan berdampak menimbulkan persengketaan antara pihak pemberi *gala (urueng peugala)* dengan pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)*.

Di sisi lain adanya pemahaman dalam masyarakat bahwa pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* berhak atau boleh menguasai dan manfaat terhadap hasil objek *gala* (agunan) tanpa mengurangi biaya dari pinjaman dari pemberi *gala (urueng peugala)* selama pemberi *gala (urueng peugala)* belum menebusnya.

Apabila diperhatikan pemahaman terhadap pemanfaatan dan penguasaan terhadap objek *gala* tentunya tidak sesuai dengan konsep yang terdapat dalam Mazhab Imam Syafi’i. Imam Syafi’i, Imam Hanafi dan Imam maliki pada umumnya tidak membolehkan bagi pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* untuk memanfaatkan objek *gala* (agunan) karena akan memberikan dampak kemudharatan kepada pihak pemberi *gala (urueng peugala)* dan para ulama sepakat objek *gala* (agunan) hanya dapat dijadikan sebagai barang jaminan atas suatu perjanjian *gala* bagi pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)*.

Adanya perbedaan pendapat pada Imam Hambali terutama dalam aspek perjanjian *gala* pada benda (objek jaminan) yang bergerak. Menurut Imam Hambali, apabila pemanfaatan dilakukan atas seizin dari pihak pemberi *gala (urueng peugala)* maka pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* boleh memanfaatkan benda *gala* (agunan) sebesar biaya yang dikeluarkan untuk keperluan perawatan atau perbaikan dari objek *gala* (agunan tersebut, dimisalkan pada hewan ternak penerima *gala (urueng teurimong gala)* boleh memerah susu sapi sebesar dengan biaya yang dikeluarkan untuk pakan dan biaya perawatan sapi tersebut.

Pada suatu kontek dasar ekonomi Islam benda *gala* (agunan) hanya dapat dijadikan sebagai suatu objek jaminan atas kepercayaan pihak pemberi *gala (urueng peugala)* untuk menebus kembali kepada pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* sehingga dengan alasan tersebut pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* tidak ragu memberikan uang atau emas untuk pihak pemberi *gala (urueng teurimong gala)* dikeranakan adanya barang jaminan. Akan tetapi apabila para pihak sudah saling mempercayai maka perjanjian *gala* juga akan dibolehkan tanpa adanya agunan.

Pemanfaatan dan penguasaan dalam perjanjian *gala* atas pemanfaatan objek *gala* (barang agunan) oleh pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* dengan anggapan untuk mendapatkan untung yang berupa bunga dan hal lain yang tidak dibolehkan sesuai dengan konsep perekonomian Islam dikarenakan apabila adanya prinsip mencari keuntungan itu dapat menjurus ke riba.[[124]](#footnote-124)

Islam mengajarkan pada umatnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan ummah (kepentingan umum) yang apabila dikerjakan akan berdampak akan membawa manfaat dan meninggalkan perbuatan yang bersifat *mudharat*, sehingga apabila dilaksanakan atau dilakukan tentunya akan berdampak akan terhindar dari kezaliman dan praktik ketidakadilan.

Pemanfataan dan penguasaan atas dasar kemaslahatan dengan tujuan saling bantu-membantu antar sesama tentunya dibolehkan apabila pihak pemberi *gala (urueng peugala)*  dan penerima *gala (urueng teurimong gala)* dalam pelaksanaan perjanjian *gala* sepakat untuk menerapkan 3 (tiga) akad perjanjian, antara lain adalah:

1. Perjanjian hutang piutang dengan *gala* dalam bentuk *Al-Qardhul Hassan*.

Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif, maka untuk itu pemberi *gala (urueng peugala)* dikenakan biaya berupa upah atau biaya kepada pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* karena telah menjaga dan merawat objek *gala* (barang agunan).

Sebenarnya dalam akad *al-qardhul hassan* tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya administrasi, namun demikian ketentuan untuk biaya administrasi pada pinjaman dengan cara menyatakan dalam nominal dan sifatnya harus jelas, nyata dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan dalam kontrak.

Mekanisme pelaksanaan akad *Al-Qardhul Hassan*:

1. Objek *gala* (barang agunan) berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik.
2. Tidak ada pembagian bagi hasil, dikarenakan pada akad ini bersifat sosial *(tabarru’)*. Tetap diperkenankan menerima upah atau biaya sebagai pengganti biaya administrasi yang biasanya diberikan pihak pemberi *gala* *(ureung peugala)* kepada penerima *gala (urueng teurimong gala)*.
3. Perjanjian hutang piutang dengan *gala* dalam bentuk *Al-Mudharabah*.

Akad *mudharabah* adalah akad yang dilakukan oleh pemberi *gala(urueng peugala)* yang menggalakan objek *gala* (barang agunan) untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Dengan akad ini pemberi *gala (urueng peugala)* akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang didapat oleh pihak pemberi *gala (urueng peugala)*  kepada penerima *gala (urueng teurimong gala)* sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi.

Jika objek *gala* (barang agunan) dapat dimanfaatkan, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan barang *gala*, dengan jenis akad yang dapat disesuaikan dengan jenis barangnya. Jika pemberi *gala (urueng peugala)* tidak berniat memanfaatkan objek *gala* (barang agunan) tersebut maka penerima *gala (urueng teurimong gala)* dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu. Akan tetapi hasilnya harus diserahkan kepada pemilik barang gadai sebagian.

Ketentuan akad *mudharabah*:

1. Jenis objek *gala* (barang agunan) dalam akad ini adalah semua jenis barang asal bisa dimanfaatkan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Seperti tanah sawah *(umoeng blang),* tanah perkebunan *(seuneubok),* kebun *(lampoh)*, tambak ikan *(neuheun)* dan barang-barang lain yang dianggap mempunyai nilai jual (berharga).
2. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang *gala* adalah keuntungan setelah dikurangi biaya pengelolaan, adapun ketentuan persentase *nisbah* (bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk *Bai' Al-Muqoyyadah.*

Akad *ba’i muqayyadah* adalah akad yang dilakukan apabila pemberi *gala (urueng peugala)* ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan yang bersifat produktif seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman pemberi *gala (urueng peugala)* harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam hal ini pemberi *gala (urueng peugala)* dapat memberi keuntungan berupa penetapan harga atas barang yang dibelikan oleh penerima *gala (urueng teurimong gala)*. Atau dengan kata lain penerima *gala (urueng teurimong gala)* dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh pemberi *gala (urueng peugala)* dengan akad jual beli, sehingga pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* dapat mengambil keuntungan berupa untung dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

1. **Bentuk Rekonstruksi Perjanjian *Gala* Berbasis Syariah**

Pada abad sekarang ini, susunan masyarakat menjadi semakin kompleks dan semakin maju. Dalam kondisi yang demikian ini hukum diharuskan mengikuti perkembangan atau merespon apa yang terjadi di masyarakat. Perkembangan yang demikian ini mendorong hukum untuk tidak hanya berperan sebagai sarana pengendali sosial saja, melainkan lebih dari itu sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Untuk itu yang menjadi faktor kunci dari bekerjanya hukum adalah peraturan-peraturan hukumnya, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau bertentangan dengan norma yang ada, badan pembuat undang-undang, badan pelaksana hukum haruslah yang kredible dan profesional, masyarakat sebagai sasaran pengaturan, proses penerapan hukum, komunikasi hukum baik dengan peraturan yang lain sehingga tidak tumpang tindih maupun media sosialisasi kepada masyarakatnya, proses umpan balik antar subyek hukum dan substansi hukumnya.[[125]](#footnote-125)

Secara esensi upaya penegakan hukum terletak pada upaya preventif dan represifnya. Upaya preventif berarti pengawasan aktif yang dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut kejadian konkret, ini dilakukan dengan penyuluhan, pengawasan, pemantauan. Sedangkan represif dilakukan dalam hal ada perbuatan melanggar peraturan, dan upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mengakhiri perbuatan terlarang yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman.

Upaya pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang berlandaskan nilai-nilai syari’ah sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang menyebutkan bahwasanya: “Pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan adat istiadat dalam masyarakat adat Aceh harus berpedoman pada nilai-nilai Islami”.

Dalam kehidupan masyarakat adat Aceh terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam suatu perjanjian *gala* dalam kehidupan masyarakat adat Aceh diantaranya mengenai penetapan batas waktu dalam perjanjian *gala* dan pemanfaatan dan penguasaan benda *gala* (agunan) oleh pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)*.

Maka apabila melihat permasalahan di atas tentunya perjanjian *gala* yang berada pada masyarakat adat Aceh perlu untuk direkontruksikan kembali baik dari bentuk mekanisme dan pelaksaan perjanjian *gala* secara komperhensif. Untuk dapat merekonstruksi tentunya haruslah melihat bentuk pelaksaan yang tidak sesuai terutama dalam aspek jangka waktu perjanjian dan pemanfaatan objek gala (agunan) sehingga perjanjian *gala* tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum di Indonesia sehingga dapat dilaksanakan kembali perjanjian *gala* berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam, nilai-nilai Islam dan ketentuan-ketentuan tersebut.

Terdapat dua permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian *gala* diantaranya adalah:

1. Penetapan Batas Waktu Perjanjian *Gala* Pada Masyarakat Adat Aceh.

Mengenai penetapan batas waktu dalam suatu mekanisme perjanjian *gala* yang berkembang dalam kehidupan masyarakat adat Aceh saat ini tidak mempunyai batas waktu tertentu mengenai berakhirnya jangka waktu perjanjian *gala* dikarenakan pada kebiasaanya para pihak baik pemberi *gala (urueng peugala)* dan pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* akan menganggap perjanjian *gala* tersebut berakhir apabila pemberi *gala (urueng peugala)* telah melakukan pembayaran dengan sejumlah uang penebusan objek *gala* (agunan) kepada penerima *gala (urueng teurimong gala)*.

1. Pemanfaatan dan penguasaan objek *gala* (agunan)*.*

Akibat dari tidak adanya pembatasan waktu berakhirnya perjanjian *gala* pada kebiasaan masyarakat adat Aceh tentunya akan memberikan dampak terhadap pemanfaatan dan penguasaan objek *gala* (agunan) oleh pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* dan akan memberatkan pihak pemberi *gala (urueng teurimong gala)* dikarenakan objek *gala* (agunan) merupakan sumber utama pendapatan bagi keluarganya dikarenakan jika pemberi *gala (urueng peugala)* hanya memiliki 1 petak sawah dan kemudian mereka menggalakannya kepada orang kaya (penerima *gala*), maka secara spontanitas mata pencaharian pemberi *gala (urueng peugala)* sehari-hari sudah hilang, dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan primer dan membayar atau menebus kembali benda *gala* (agunan) kepada pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* akan semakin sulit dan terdesak.

Apabila melihat kedua permasalahan yang terdapat dalam perjanjian *gala*  pada masyarakat adat Aceh tentunya akan adanya ketidak sesuaian mengenai penetapan batas waktu perjanjian *gala* dengan isi ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2) *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang menyebutkan bahwasanya: “Pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan adat istiadat dalam masyarakat adat Aceh harus berpedoman pada nilai-nilai Islami”, dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mengatur batas waktu suatu perjanjian yang menjadikan tanah sebagai suatu objek gadai (agunan) tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Sedangkan apabila dilihat dari sisi syariah tidak adanya batas waktu dalam perjanjian *gala* juga memberikan dampak terhadapat atas ketidak sesuaian dengan ketentuan konsep dasar perekonomian Islam yang melarang adanya unsur *gharar* (ketidak jelasan) dalam suatu perjanjian agar pemberi *gala (urueng peugala)*. Pelarangan adanya unsur *gharar* ini dimaksudkan agar terhindari dari ketidak jelasan (ketidak pastian) dengan tujuan untuk menjauhkan dari perbuatan riba.

Pemanfaatan dan penguasaan terhadap objek *gala* (agunan) oleh pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* akan memberikan dampak pada penguasaan lahan yang tanpa adanya batas waktu terhadap pemanfaatan lahan sehingga akan memberikan kemudharatan bagi pihak pemberi *gala (urueng peugala)* dikarenakan tidak bisa memanfaatkan tanah atau barang *galaanya* tersebut*.*

Menurut beberapa pendapat Ulama pemanfaatan dan penguasaan terhadap objek *gala* (agunan) ada yang tidak membolehkan sama sekali untuk menguasai dan memanfaatkan objek *gala* (agunan) dan membolehkan untuk memanfaatkan barang *gala* (agunan) namun hanya sebesar biaya perawatan atas objek *gala*  (agunan) selama berada objek *gala* berada dalam penguasaan pihak penerima *gala (urueng peugala)*.

**Penerapan konsep akad mudharabah dalam perjanjian gala.**

Berakhirnya suatu perjanjian *gala* pada masyarakat adat Aceh adalah setelah pihak pemberi *gala* *(urueng peugala)* menebus harta *galaanya* pada pihak penerima  *gala (urueng teurimong gala)*. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa perjanjian *gala* yang berada di dalam masyarakat adat Aceh itu tidak mempunyai batas waktu tertentu, akan tetapi berakhirnya suatu perjanjian *gala* adalah ketika telah ditebusnya objek *gala* (barang agunan).

Selama berjalannya perjanjian *gala*, objek *gala* (agunan) berada pada pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)*, dan pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* berhak menikmati dan menguasai hasil dari objek *gala* tanpa mengurangi hutang dari pihak pemberi *gala (urueng peugala)*. Apabila melihat konsep perjanjian *gala* tersebut tentunya akan memberikan dampak pemerasan bagi pihak pemberi *gala (urueng peugala)* dan hilangnya nilai-nilai tolong menolong antar sesama dan dapat menjurus ke riba.

Berdasarkan sebagian besar Ulama berpendapat bahwa pemanfaatan dan penguasaan objek *gala* (barang agunan) tersebut tidak dibolehkan jika hasil keuntungan yang diperoleh atas pemanfaatan dan penguasaan barang *gala* (barang agunan) tidak mengurangi utang pihak pemberi *gala (urueng peugala)*, akan tetapi apabila dapat mengurangi hutang pihak pemberi *gala (urueng peugala)* maka pemanfaatan dan penguasaan barang *gala* (barang agunan)dibolehkan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Agar sahnya dan tepenuhinya persyaratan sahnya pemanfaatan terhadap objek *gala* maka para pihak pemberi *gala (urueng peugala)* dan pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* haruslah sepakat untuk membuat suatu akad *mudharabah* dalam perjanjian *gala.*[[126]](#footnote-126)

Kata *mudharabah* berasal dari akronim *“ad-dharu fi’l ardhi”* yang artinya bepergian untuk berdagang. Sinonim dari kata tersebut adalah *qiradh* yang berasal dari kata *al qardhu* yang berarti potongan dikarenakan pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan dengan kata lainnya adalah *muammalah.[[127]](#footnote-127)*

Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa *mudharabah* merupakan suatu bentuk akad syarikat dalam keuntungan dan modal harta dari salah satu pihak dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain. Mazhab maliki memaknai *mudharabah* sebagai suatu pemberian modal untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan jika diketahui jumlah dan keuntungan. Pada mazhab Syafi’i *mudharabah* mempunyai arti suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Dan di dalam mazhab Hanbali menyebutkan *mudharabah* adalah penyerahan suatu modal tertentu dengan jelas jumlahnya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan keuntungan bagian tertentu dari keuntungannya.[[128]](#footnote-128)

Berdasarkan pengertian dari beberapa Ulama maka dapat diambil kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad (perjanjian) kerjasama antara pihak penerima *gala (urueng peugala)* atau pemodaldan pemberi *gala (urueng peugala)* atau pengelola yang kemudian keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak.

Penerapan akad *mudharabah* dalam perjanjian *gala* akan sangat membantu bagi pihak dan tidak memberatkan dan menghilangkan unsur-unsur pemerasan kepada pihak pemberi *gala (urueng peugala)* dan tidak sebagaimana yang dilakukan oleh pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* selama ini.[[129]](#footnote-129)

Mekanisme penerapan akad *mudharabah* dalam perjanjian *gala* dilakukan setelah adanya kesepaktan antara pihak pemberi *gala (urueng peugala)* dan pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* yang disudahi dengan bentuk serah terima antara keduanya, ketika pihak pemberi *gala (urueng peugala)* menyerahkan objek *galaanya* (barang agunan) kepada pihak penerima *gala* *(urueng teurimong gala).* Sedangkan pada posisi lain pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* menyerahkan uang atau emas yang akan dipinjamkan oleh pihak pemberi *gala (urueng peugala)* maka setelah adanya kesepakatan yang disertai penyerahan dari para pihak maka barulah para pihak memulai akad *mudharabah* (bagi hasil) atas objek *gala* (barang agunan).

Ketika para pihak memulai akad *mudharabah* haruslah adanya penetapan *nisbah* (bagi hasil) terhadap penetapan terhadap jumlah *(nisbah)* bagi hasil sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak di mana pihak pemberi *gala (urueng peugala)* menjadi pemilik barang yang objeknya tersebut dapat berupa tanah sawah *(umoeng blang),* tanah perkebunan *(seuneubok),* kebun *(lampoh)*, tambak ikan *(neuheun)* dan barang-barang lain yang dianggap mempunyai nilai jual (berharga), sedangkan di pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* disebut dengan istilah pemilik modal atau pengelola atau pemodal atas objek *gala (mudharabah)* milik pihak pemberi *gala (urueng peugala)*.

Maka dengan adanya penerapan akad *mudharabah* di dalam suatu transaksi *gala* sebagaimana telah dijelaskan diatas dengan otomatis pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* dibolehkan untuk memanfaatkan objek *gala* (agunan) yang dititipkan sebagai benda jaminan oleh pemberi *gala (urueng peugala)* kepada pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)*.

Skema.1.2.: Mekanisme Pembiayaan *Gala* Dengan Konsep *Mudharabah*

Perjanjian *Gala*

Pemberi *Gala*

*(urueng peugala)*

Penerima *Gala*

*(Urueng teurimong gala)*

Perjanjian bagi hasil

Bentuk Usaha

Pembagian Keuntungan

Modal

Modal

Objek *Gala*

Pengembalian Modal

Penjelasan:

1. Jika para pihak telah kesepakatan untuk melakukan praktek perjanjian *gala* maka terjadilah penyerahan objek *gala* (barang agunan).
2. Objek *gala* (barang agunan) yang dimaksud merupakan barang yang bisa dimanfaatkan.
3. Jika objek *gala* (barang agunan) bisa dimanfaatkan maka akan dilakukan kesepakatan atas pemanfaatan dan penguasaan objek *gala* (barang agunan) dengan konsep *mudharabah* (bagi hasil) di mana nantinya hasil yang diperoleh atas pemanfaatan dan penguasaan objek *gala* (barang agunan) digunakan oleh penerima *gala (urueng teurimong gala)* untuk biaya pelunasan hutang dari pihak pemberi *gala (urueng peugala)*.
4. Penerima *gala* menentukan bentuk usaha dengan menyertai pemberian modal.
5. Keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi biaya pengololaan dan biaya modal dari objek *gala* (barang agunan) tersebut barulah dibagikan untuk pemberi *gala (urueng peugala)* dan penerima *gala (urueng teurimong gala)*.

Apabila melihat skema di atas jika dalam pelaksanaan perjanjian *gala* menerapkan akad *mudharabah* tentunya tidak akan menghilangkan nilai-nilai dan konsep tolong-menolong antar sesama, dan dengan adanya akad *mudharabah* keuntungan yang diperoleh dari objek *gala* (benda agunan) dapat dibagi dan dinikmati oleh kedua belah pihak sebagaimana diperjanjiakan sebelumnya, sehingga disisi pihak pemberi *gala (urueng peugala)* juga akan merasakan akan sangat terbantu selain tidak memutuskan mata pendapatan (pencaharian) dengan adanya akad *mudharabah* dalam perjanjian *gala* juga akan menutupi hutang-hutang dari hasil pembagian keuntungan tersebut kepada pihak penerima *gala (urueng teurimong gala).*

Sistem pembayaran atau penebusan hutang-hutang dalam perjanjian *gala* dari pihak pemberi *gala (urueng peugala)* kepada pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* apabila menggunakan konsep *mudharabah* maka dapat dicontohkan sebagai berikut:

Dimisalkan saja pemberi *gala (urueng peugala)* meminta pinjaman uang kepada pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* sebanyak Rp. 60.000.000,00.- (enam puluh juta rupiah) dengan objek jaminan 1 (satu) *naleh[[130]](#footnote-130) umoeng blang*. Tiap 1 (satu) *naleh umoeng blang* akan menghasilkan panen padi saat dipanen adalah sebanyak 2000 KG, harga jual perkilonya adalah sekitaran Rp. 5.000,00.- (lima ribu rupiah). Dari luas 1 (satu) *naleh umoeng blang* akan menghasilkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) persekali panen.

Setelah dikeluarkan biaya perawatan (pengelolaan), pupuk dan lainnya, katakanlah keuntungan bersihnya sekitaran Rp. 6.000.000,00.- (enam juta rupiah). Maka jika keduanya sepakat untuk melanjutkan *mudharabah*, maka dalam jangka waktu 5 tahun pihak pemberi *gala (urueng peugala)* sudah bisa melunasi piutang penerima *gala* *(ureung teurimong gala)*. Berikut rinciannya dalam 1 tahun pada kebiasaan petani menghasilkan 2 kali panen. Satu kali panen (3 bulan) pihak penggala mendapatkan keuntungan Rp. 6.000.000,00.- x 2 = Rp. 12.000.000,00.- x 5 tahun = Rp. 60.000.000,00.-.

Melihat penjelasan di atas maka apabila perjanjian *gala* dalam masyarakat Kemukiman Kuta reuntang menggunakan akad *mudharabah* tentunya akan memberikan dampak terhadap pemanfaatan dan penguasaan atas objek *gala* tidak akan melebihi dari 7 (tujuh) tahun sehingga pemanfaatan objek *gala* ini tidak akan bertentangan baik dengan ketentuan yang terdapat di dalam Perpu 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ataupun dengan ketentuan dan nilai-nilai syariah sebagaimana terdapat pada Pasal 2 ayat (2) *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Selain itu perjanjian *gala* dengan menggunakan konsep *mudharabah* tidak akan ada istilah satu untung dan satu rugi, dikeranakan pada konsep awalnya praktek *mudharabah* suatu perbuatan tolong-menolong antar sesama masyarakat dengan mengharapkan ridha dan balasan berupa pahala dari Allah.

Adanya suatu penetapan akad *mudharabah* dalam suatu perjanjian *gala* akan terdapat perbedaan antara perjanjian *gala* syariah dengan perjanjian *gala* dalam masyarakat adat Aceh dapat dilihat sebagai berikut:

 Tabel Perbedaan Perjanjian Gala dan Perjanjian Gala Berbasis Syariah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Aspek Perbedaan | Perjanjian *Gala* | Perjanjian *Gala* Berbasis Syariah |
| 1. | Akad | Dalam perjanjian *gala* hanya menggunakan akad *gala.* | Dalam perjanjian *gala* yang berbasis syariah maka akan didukung dengan akad *ijarah* dan akad *rahn.*  |
| 2. | Landasan konsep | Saling bantu-membantu (tolong-menolong) antar sesama. | suatu bentuk sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan balas jasa. |
| 4. | Bunga | Hasil dari pemanfaatan objek *gala* (barang agunan) dianggap sebagai bunga atau balas jasa dari pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)* | Tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman. |
| 5. | Pemanfaatan barang *gala* (objek agunan) |  | Pemanfaatan barang *gala* (objek agunan) pada perjanjian *gala* syariah tidak dibolehkan namun apabila para pihak menerapkan akad *mudharabah* dalam perjanjian *gala* maka pemanfaatan atas objek gala (barang agunan) maka barulah boleh dimanfaatkan. |
| 6. | Berakhirnya perjanjian *gala* | Jika objek gala (barang agunan) telah ditebus oleh pihak pemberi gala *(urueng peugala)* kepada pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)*. | Perjanjian *gala* syariah akan berakhir jika hasil atau keuntungan dari objek gala (barang agunan) sudah dapat mengganti (membayar) sebesar dengan biaya yang dihutangkan oleh pihak pemberi gala *(urueng peugala)* kepada pihak penerima *gala (urueng teurimong gala)*. |

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Maka berdasarkan pembahasan dan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyatakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pelaksanaan perjanjian *gala* masyarakat adat Aceh pada umumnya hampir menyerupai perjanjian gadai. Jika para pihak dalam perjanjian *gala* telah sepakat untuk melakukan perjanjian *gala* maka para pihak melakukan serah terima *(ijab kabul)* yang disertai dengan penyerahan tanahnya atau jaminan *gala* (barang agunan)dari pihak pemberi *gala (urueng peugala)* kepada pihak penerima *gala (urueng trimong gala)* dalam bentuk hak pakai, sedangkan dipihak penerima *gala (urueng trimong gala)* menyerahkan uang dengan kesepakatan yang dipenuhi sebagaimana telah diperjanjikan antara keduanya dalam bentuk tunai *(cash)*. Berakhirnya suatu perjanjian *gala* dalam masyarakat adat Aceh jika objek *gala* (barang agunan) tersebut telah ditebus.
2. Perjanjian *gala* dan gadai syariah pada dasarnya merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam dengan menahan sesuatu barang jaminan (objek gala) sebagai tanggungan hutang. Jika ditinjau konsep perjanjian *gala* dari perspektif syariah maka adanya ketidaksesuaian diantara keduanya. Dalam suatu perjanjian *gala* tidak mengenal adanya batas waktu berakhirnya perjanjian *gala* dan hasil yang diperoleh atas pemanfaatan objek gala (barang agunan) dianggap sebagai suatu bentuk balas jasa dari pihak pemberi *gala (urueng peugala)* atas uang atau emas yang dipinjamkan oleh pihak penerima *gala (ureung teurimong gala)* tanpa mengurangi hutang pihak pemberi *gala (urueng peugala)*. Sedangkan dalam perspektif syariah tidak adanya batasan waktu dan pemanfaatan atas barang gala (objek jaminan) akan menjuruskan perjanjian gala ke dalam perbuatan *gharah* dan *riba*.
3. Objek *gala* (barang agunan) yang berada dalam masyarakat Kemukiman Kuta Reuntang pada umunya adalah tanah. Maka salah satu bentuk rekontruksi terhadap perjanjian *gala* yang sesuai dan berbasis syariah dalam masyarakat Kemukiman Kuta Reuntang yaitu dengan menerapkan akad *mudharabah*, sehingga dengan adanya penerapan akad *mudharabah* pada pelaksanaan perjanjian *gala* yaitu bertujuan untuk tidak menghilangkan nilai-nilai *ta’awun* atau suatu prinsip tolong menolong yang didasari prinsip saling menjamin dan tidak hanya memikirkan keuntungan bisnis atau keuntungan materi sehingga dapat menjauhkan para pihak dalam melakukan perjanjian *gala* dari perbuatan *gharar* dan *riba.*
4. **Saran**

Bentuk saran yang dapat penulis sampaikan melalui kesempatan ini adalah sebagai berikut:

Diharapkan kepada para pihak dalam melaksanakan perjanjian *gala* agar tidak melupakan konsep awal dari perjanjian *gala* di mana pada konsep awal suatu perjanjian *gala* adalah murni atas dasar saling tolong-menolong antar sesama dan perjanjian *gala* tidak digunakan sebagai suatu wadah untuk mencari keuntungan dari hasil pemanfaatan objek *gala* (barang agunan).

Pelaksanaan perjanjian *gala* pada masyarakat adat di Aceh sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, hal ini mengacu kepada pasal 2 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan adat istiadat haruslah berpedoman pada nilai-nilai Islami. Sehingga nantinya dalam pelaksanaan perjanjian *gala* pada masyarakat tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariah dan tidak menjerumuskan para pihak dalam perjanjian *gala* dalam praktek *gharar* dan riba.

Adanya kekosongan hukum terutama dalam hal tata cara bermuamalah yang sesuai dengan ketentutuan nilai-nilai syariah berdampak pada penyimpangan-pinyampangan dalam aturan dan pelaksanaan. Maka berdasarkan alasan tersubut penulis mengharapakan kepada Pemerintah Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh untuk membuat *qanun* khusus tentang tata cara pelaksanaan *gala* dan tatacara *muamalah* yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga pelaksanaan konsep *muammalah* di Aceh kedepan tidak menjadi pertentangan antara aturan dan pelaksanaan berdasarkan ketentuan dan nilai-nilai islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku, Hasil Penelitian, Jurnal dan Artikel**

A. Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.

A. Malik, *Perjanjian “Gala” dalam Masyarakat Hukum Adat Aceh di Kecamatan Lhoknga/Leupung Kabupaten DATI II Aceh Besar,* Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 1997.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Al Jaziri dan Abu Bakr Janir, *Ensikplodea Muslim Minhajul Muslim,* Jakarta, Daarul Haq, 2000.

Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah,* Juz 2, Dar Al-Fikr, 1995.

Anonim, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh,* Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2008.

Azharsyah Ibrahim, *Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam*, Malaysia, Procceeding of the Aceh development International Conference, International Islamic University 2012.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, *Kecamatan Meurah Dua dalam Angka,* BPS Kabupaten Pidie Jaya, 2015.

Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society,* Oxford University Press, New York, 2006.

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat,* Jakarta, Pradnya Paramita, 1976.

C. Snouck Hurgronje*, De Islam in Nederlandsch Indie*, alih bahasa S. Gunawan, *Islam di Hindia Belanda*, Bhratara, Cet.II, Jakarta, 1983.

Chuizaman T Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* Edisi ke-III, LSIK, Jakarta, 1997.

Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia,* Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,* PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005.

\_\_\_\_\_\_\_, *“Urgensi Memahami Hukum dengan Pendekatan Socio-Legal dan Peranannya dalam Penelitian”.* Makalah Seminar Nasional Penelitian dalam Perspektif Socio-Legal dan, Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, Semarang, 22 Desember 2008.

Faizalbin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nail Al-Awthar,* Terj. Mu’ammalah Hamady, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Friedman, *Law*, W.W. Norton & Company, New York, 1984.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,* Cet. I, Jakarta, Tintamas, 1975.

\_\_\_\_\_\_\_, *Tujuh Serangkai tentang Hukum,* Cet. I, Jakarta, Tintamas, 1974.

Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

\_\_\_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.

Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.

Husni, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, PPS Unpad, 2004, hal. 265.

I Nyoman Nurjaya, *Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum,* <http://www.huma.or.id>.

Ichtijanto, *Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama,* Dirbinperta Departemen Agama Republik Indonesia, Cet. I, Jakarta, 1985.

Ifan Noor Adham, *Perbandingan Hukum Gadai di Indonesia,* Tatanusa, Jakarta, 2009.

Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran Bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fiy, *Shahih Al-Bukhari,* Juz 3, Dar Al-Fikr, 1983.

Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim,* Dar Al-Fikr, 1993.

Iman Sudiyat, *Asas- Asas Hukum Adat Bekal Pengantar Cetakan ke.-5*, Liberty, Yogyakarta, 2010.

\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1980.

J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

J.F.Holleman and Vollenhoven, *Indonesian Adat Law*, Leiden, 1981.

Limei Pasaribu, *Keberadaan Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir,* Tesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, USU, 2011.

Mahadi, *Soal Dewasa,* cetakan ke II, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1991.

Mariam Darus Badrulzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 1979.

\_\_\_\_\_\_\_, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

\_\_\_\_\_\_\_, *K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan,* Alumni, Bandung, 1996.

Muhammad Ali Ash-Shabumi, *Shafwat*  *At-Tafasir,* Maktabah, Al-Ghazali, Juz 1, Cet. 1, Damaskus, 1986.

Muhammad dan Sholikhul hadi, *Pengadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pengadaian Nasional,* Edisi 1, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003.

Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan,* Jakarta, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001.

Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah,* UII Press, Yogyakarta, 2001.

Pasaribu, Chairuaman., dkk., *Hukum Perjanjian dalam Islam,* Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

R. Setiawan*, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987.

Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Rahmat Syafei, *Konsep Gadai: Ar-Rahn dalam Fikih Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial,* Lembaga Studi dan Kemasyarakatan, Cetakan Kedua, Jakarta, 1995.

Reza Banakar and Max Travers, *“law Sociology and Method”,* in *Social and Legal Studies,* International Institute, 2003.

Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia,* Jakarta, UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006.

Salim H.S, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Sanusi M. Syarif., *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca tsunami,* Pustaka Latin, Bogor, 2005.

Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009.

\_\_\_\_\_\_\_, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia: kaitannya dengan profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Bina Aksara, Cet. III, Jakarta, 1982.

\_\_\_\_\_\_\_, *Receptio A Contrario*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah 13,* terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, Penerbit Al-Ma’arif, Bandung, 1987.

Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat,* Rajawali, Jakarta, 1981.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

\_\_\_\_\_\_\_, *Penelitian Normatif Sautu tinjauan Singkat,* Raja Grafindo, Depok, 1982.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma.Metode dan Dinamika Masalahnya,* HuMa, Jakarta, 2012.

Sri Soedewi Masjchon, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Sri Sofwan Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty Offset, yogyakarta, 2003.

Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992.

\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996.

\_\_\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif,* Pustaka Setia, Bandung, 2002.

Sulaiman, *Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laot di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberlanjutan Lingkungan Yang Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat,* Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Suriyaman Mustari Pide A, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang,* Jakarta, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Taqwaddin Husen, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe,* Banda Aceh, Bandar Publishing, 2013.

\_\_\_\_\_\_\_, Sulaiman, dkk, *Mukim di Aceh (Belajar Dari Masa Lalu Untuk Membangun Masa Depan),* Diandra Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2015.

\_\_\_\_\_\_\_, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh,* Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010.

Ter Haar, B, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Terj. Soebakti Poesponoto)*, Pradnya Paramita, Jakarta 1979.

T. Juned, Mustafa Ahmad dan Hakim Nyak Pha, *Bunga Rampai Menuju Revitalisasi Hukom dan Adat Aceh,* Yayasan Rumpun Bambu, Banda Aceh, 2003.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu,* Dar Al-Fikr, Juz VI, Cet ke-4, Beirut, 2002.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah,* Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Zaki Fuad Chalil, *Horizon Ekonomi Syariah: Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi Pendapatan,* Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2008.

**Ketentuan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Aceh dengan Nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim.*

*Qanun* Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat-Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2009 tentang Adat dan Istiadat.

1. A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang,* Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 1-2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Husni, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, PPS Unpad, 2004, hal. 265. [↑](#footnote-ref-2)
3. Azharsyah Ibrahim, *Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam*, Malaysia, Procceeding of the Aceh development International Conference, International Islamic University 2012, hal. 445. [↑](#footnote-ref-3)
4. Taqwaddin Husen, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe,* Bandar Publishing, Banda Aceh, 2013, hal. 90. [↑](#footnote-ref-4)
5. Taqwaddin Husen, *Ibid.,* hal. 91 [↑](#footnote-ref-5)
6. Azharsyah Ibrahim, *Op. Cit.,* hal. 58. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zaki Fuad Chalil, *Horizon Ekonomi Syariah: Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi Pendapatan,* Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2008, hal. 190. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Qanun* merupakan sebutan khusus Peraturan Daerah di Aceh, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 dan UU Nomor 11 Tahun 2006. [↑](#footnote-ref-8)
9. I Nyoman Nurjaya, *Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum,* <http://www.huma.or.id> diakses pada pukul 15:00 WIB, tanggal 17 September 2016. [↑](#footnote-ref-9)
10. Friedman, *Law*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hal. 5-7. [↑](#footnote-ref-10)
11. Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hal. 112. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sulaiman, *Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laot di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberlanjutan Lingkungan Yang Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat,* Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 39. [↑](#footnote-ref-12)
13. Al-Qur’an, lihat Surat Al Maidah ayat 2, Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. [↑](#footnote-ref-13)
14. Thalib, Sayuti, *Receptio A Contrario*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 4. [↑](#footnote-ref-14)
15. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, *Kecamatan Meurah Dua dalam Angka,* BPS Kabupaten Pidie Jaya, Pidie Jaya, 2015, hal. 14. [↑](#footnote-ref-15)
16. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma.Metode dan Dinamika Masalahnya,* HuMa, Jakarta, 2012, hal. 160. [↑](#footnote-ref-16)
17. Reza Banakar and Max Travers, *“law Sociology and Method”,* in *Social and Legal Studies,* International Institute, 2003, p. 4-5. Menurut Esmi Warassih, konsep hukum dimaknai sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi mereka. Lihat, Esmi Warassih, “Urgensi Memahami Hukum dengan Pendekatan *Socio-Legal* dan Peranannya dalam Penelitian”. Makalah Seminar Nasional Penelitian dalam Perspektif Socio-Legal dan, Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, Semarang, 22 Desember 2008, hal. 6. Tujuan Socio-Legal Research sendiri merupakan suatu pemahan hukum secara lebih menyeluruh. Model penelitian ini, terutama untuk hal-hal yang tidak terjangkau oleh ancangan normatif. Lihat Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia: kaitannya dengan profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 43. Kajian ini juga melihat hukum dalam konteks masyarakat. Satjipto Rahardjo, Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hal. 127. Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society,* Oxford University Press, New York, 2006, p. 2. [↑](#footnote-ref-17)
18. Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif,* Pustaka Setia, Bandung, 2002, hal. 152. [↑](#footnote-ref-18)
19. Marzuki, *Metodologi Riset*, Badan penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2000, hal. 87. [↑](#footnote-ref-19)
20. Soerjono Soekanto, *Penelitian Normatif Sautu tinjauan Singkat,* Raja Grafindo, Depok, 1982, hal. 12. [↑](#footnote-ref-20)
21. Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia,* Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal. 2. [↑](#footnote-ref-21)
22. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 1. [↑](#footnote-ref-22)
23. Iman Sudiyat, *Asas- Asas Hukum Adat Bekal Pengantar Cetakan ke.-5*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hal. 1-2. [↑](#footnote-ref-23)
24. Taqwaddin, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh,* Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010, hal 36. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.,* hal 3 [↑](#footnote-ref-25)
26. Limei Pasaribu, *Keberadaan Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir,* Tesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan,USU, 2011. [↑](#footnote-ref-26)
27. Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hal. 30. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid*., hal. 44. [↑](#footnote-ref-28)
29. Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia,* UNDP Regional Centre in Bangkok, Jakarta, 2006, hal. 23. [↑](#footnote-ref-29)
30. Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 75. [↑](#footnote-ref-30)
31. Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 92. [↑](#footnote-ref-31)
32. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.,* hal. 108. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid.,* hal. 109. [↑](#footnote-ref-33)
34. Husen Alting, *Op.Cit.,* hlm. 46. [↑](#footnote-ref-34)
35. Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hal 12. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid*., hal. 13. [↑](#footnote-ref-36)
37. Taqwaddin Husin, Sulaiman, dkk, *Mukim di Aceh (Belajar Dari Masa Lalu Untuk Membangun Masa Depan),* Diandra Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2015, hal. 57. [↑](#footnote-ref-37)
38. Sanusi M. Syarif., *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca tsunami,* Pustaka Latin, Bogor, 2005, hal. 63. [↑](#footnote-ref-38)
39. A. Malik, *Perjanjian “Gala” dalam Masyarakat Hukum Adat Aceh di Kecamatan Lhoknga/Leupung Kabupaten DATI II Aceh Besar,* Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 1997, hal. 33. [↑](#footnote-ref-39)
40. Mahadi, *Soal Dewasa,* cetakan ke II, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1991, hal. 140. [↑](#footnote-ref-40)
41. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 6. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ter Haar, B, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Terj. Soebakti Poesponoto)*, Pradnya Paramita, Jakarta 1979, hal. 13. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ifan Noor Adham, *Perbandingan Hukum Gadai di Indonesia,* Tatanusa, Jakarta, 2009, hal. 59. [↑](#footnote-ref-43)
44. A. Malik, *Op.Cit.,* hal 145. [↑](#footnote-ref-44)
45. Soerjono Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat.* Gunung Agung, Jakarta, 1994, hal. 208. [↑](#footnote-ref-45)
46. Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal. 29. [↑](#footnote-ref-46)
47. Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat,* Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 85. [↑](#footnote-ref-47)
48. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 276. [↑](#footnote-ref-48)
49. Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 276. [↑](#footnote-ref-49)
50. Rachmadi Usman, *Ibid.,* hal. 276. [↑](#footnote-ref-50)
51. Mariam Darus Badrulzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 59. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ter Haar, *Op.Cit.,* hal. 116. [↑](#footnote-ref-52)
53. Van Dijk, *Op.Cit.,* hal. 37. [↑](#footnote-ref-53)
54. Soekanto, *Op. Cit.,* hal. 87. [↑](#footnote-ref-54)
55. Soerojo Wignjodipuro, *Op.Cit.,* hal. 208-209. [↑](#footnote-ref-55)
56. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.,* hal. 134. [↑](#footnote-ref-56)
57. Rahmat Syafei, *Konsep Gadai: Ar-Rahn dalam Fikih Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial,* Lembaga Studi dan Kemasyarakatan, 1995, Cetakan Kedua, Jakarta, hal. 59. [↑](#footnote-ref-57)
58. A. Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hal. 113. [↑](#footnote-ref-58)
59. Pasaribu, Chairuman., dkk., *Hukum Perjanjian dalam Islam,* Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal 140. [↑](#footnote-ref-59)
60. Fadhilah Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam,* (ttp: tp, tt) hal. 175. Lihat juga, Muhammad Ali Ash-Shabumi, *Shafwat*  *At-Tafasir,* Maktabah, Al-Ghazali, Juz 1, Cet. 1, Damaskus, 1986, hal. 179. [↑](#footnote-ref-60)
61. *Ibid.,* hal 176. [↑](#footnote-ref-61)
62. *Ibid.,* hal 176. [↑](#footnote-ref-62)
63. *Ibid.,* hal 175. [↑](#footnote-ref-63)
64. Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim,* Dar Al-Fikr, 1993, Juz 2, hal. 51. [↑](#footnote-ref-64)
65. Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah,* Juz 2, Dar Al-Fikr, 1995, hal. 18. [↑](#footnote-ref-65)
66. Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran Bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fiy, *Shahih Al-Bukhari,* Juz 3, Dar Al-Fikr, 1983, hal. 116. [↑](#footnote-ref-66)
67. *Ibid.,* hal. 116. [↑](#footnote-ref-67)
68. Lihat, Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu,* Dar Al-Fikr, Juz VI, Cet ke-4, Beirut, 2002, hal. 4210. Lihat juga Asy-Sya’rany, *Mizan Al-Kubra*, Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, hal. 75. Lihat Faizalbin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nail Al-Awthar,* Terj. Mu’ammalah Hamady, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 1787. [↑](#footnote-ref-68)
69. Zainuddin Ali, *Op.cit.,* hal 20. [↑](#footnote-ref-69)
70. Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ‘ala Al-Madzahib,* hal. 296. [↑](#footnote-ref-70)
71. Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan,* Jakarta, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001, hal. 21. [↑](#footnote-ref-71)
72. Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit.,* hal. 296-298. [↑](#footnote-ref-72)
73. Abdurrahman Al-Jaziri, *Ibid.,* hal 296-298. [↑](#footnote-ref-73)
74. Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm,* Dar Al-Kutub, Jilid III, Beirut, hal. 169. [↑](#footnote-ref-74)
75. Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit.,* hal. 303. [↑](#footnote-ref-75)
76. Chuizaman T Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* Edisi ke-III, LSIK, Jakarta, 1997, hal. 333. [↑](#footnote-ref-76)
77. Muhammad dan Sholikhul hadi, *Pengadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pengadaian Nasional,* Edisi 1, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hal 70. [↑](#footnote-ref-77)
78. Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, *Op. Cit.,* hal 75. [↑](#footnote-ref-78)
79. Muhammad dan Sholikhul hadi, *Op.Cit.,* hal 76. [↑](#footnote-ref-79)
80. Muhammad dan Sholikhul hadi, *Ibid.,* hal 76. [↑](#footnote-ref-80)
81. Zainuddin Ali, *Op.Cit.,* hal 45. [↑](#footnote-ref-81)
82. Sabiq Sayyid, *Fikih Muammalah,* jilid ke-3, Bandung, Al Maarif, hal. 145. [↑](#footnote-ref-82)
83. Al Jaziri dan Abu Bakr Janir, *ensikplodea Muslim Minhajul Muslim,* Jakarta, Daarul Haq, 2000, hal. 533. [↑](#footnote-ref-83)
84. Sabiq Sayyid, *Fikih Muammalah,* jilid ke-3, Bandung, Al Maarif, hal 144. [↑](#footnote-ref-84)
85. Al Jaziri dan Abu Bakr Janir, *ensikplodea Muslim Minhajul Muslim,* Jakarta, Daarul Haq, 2000, hal 534. [↑](#footnote-ref-85)
86. C. Snouck Hurgronje*, De Islam in Nederlandsch Indie*, alih bahasa S. Gunawan, *Islam di Hindia Belanda*, Bhratara, Cet.II, Jakarta, 1983, hal 10. [↑](#footnote-ref-86)
87. Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Cet. III, Jakarta, Bina Aksara, 1982, hal 15. [↑](#footnote-ref-87)
88. H.W.J.Sonius, dalam J.F.Holleman and Vollenhoven, *Indonesian Adat Law*, Leiden, 1981. Lihat juga, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat,* Jakarta, Pradnya Paramita, 1976, hal. 57. [↑](#footnote-ref-88)
89. Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum,* Cet. I, Jakarta, Tintamas, 1974, hal. 101. [↑](#footnote-ref-89)
90. Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,* Tinta mas, Cet. Ke-I, Jakarta, 1975, hal. 8. [↑](#footnote-ref-90)
91. T. Juned, Mustafa Ahmad dan Hakim Nyak Pha, *Bunga Rampai Menuju Revitalisasi Hukom dan Adat Aceh,* Yayasan Rumpun Bambu, Banda Aceh, 2003, hal. 23. [↑](#footnote-ref-91)
92. Sayuti Thalib, *Op.Cit.,* hal. 69. [↑](#footnote-ref-92)
93. Ichtijanto, *Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama,* Dirbinperta Departemen Agama Republik Indonesia, Cet. Ke-I, Jakarta, 1985, hal. 262. [↑](#footnote-ref-93)
94. Safrizal, Camat Kecamatan Meurah Dua, *Wawancara,* 5 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-94)
95. Safrizal, Camat Kecamatan Meurah Dua, *Wawancara,* 5 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-95)
96. Sulaiman A. Latief, Imuem Mukim Kemukiman Kuta Reuntang, *Wawancara,* 11 januari 2017. [↑](#footnote-ref-96)
97. Teuku Ibrahim El Hakimy, *Beberapa Segi Hukum Adat Tanah Pedesaan Aceh,* Sinar Darussalam, Banda Aceh, 1981, hal 152. [↑](#footnote-ref-97)
98. Badruzzaman Ismail, Ketua Majalis Adat Aceh, *Wawancara,* 21 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-98)
99. Badruzzaman Ismail, Ketua Majalis Adat Aceh, *Wawancara*, 21 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-99)
100. Badruzzaman Ismail, Ketua Majalis Adat Aceh, *Wawancara,* 21 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-100)
101. Taqwaddin Husin, *Op. Cit.,* hal 92. Lihat juga Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 08 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih Dalam Islam di dalam putusannya menyatakan bahwa Tanah, bangunan dan kebun tidak boleh dijual dan atau disewakan kepada non muslim atau Lembaga yang pengurusnya non-muslim. [↑](#footnote-ref-101)
102. Armia, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya, *Wawancara,* 9 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-102)
103. Badruzzaman, Ketua Majelis Adat Aceh, *Wawancara,* 21 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-103)
104. Sulaiman Latief, Imum Mukim, *Wawancara,* 11 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-104)
105. Armia, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya, *Wawancara,* 9 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-105)
106. Badruzzaman, Ketua Majelis Adat, *Wawancara,* 21 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-106)
107. Badruzzaman, Ketua Majelis Adat, *Wawancara,* 21 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-107)
108. Badruzzaman, Ketua Majelis Adat Aceh, *Wawancara,* 21 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-108)
109. Badruzzaman, Ketua Majelis Adat Aceh, *Wawancara,* 21 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-109)
110. Badruzzaman, Ketua Majelis Adat Aceh, *Wawancara,* 21 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-110)
111. Armia, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya, *Wawancara,* 9 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-111)
112. Sulaiman A. Latief, Imuem Mukim Kuta Reuntang, *Wawancara,* 11 Januari 2016. [↑](#footnote-ref-112)
113. Pasal 13 *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. [↑](#footnote-ref-113)
114. Badruzzaman, Ketua Majelis Adat Aceh, *Wawancara,* 21 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-114)
115. Badruzzaman, Ketua Majelis Adat Aceh, *Wawancara,* 21 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-115)
116. Sulaiman A. Latief, Imum Mukim Kemukiman Kuta Reuntang, *Wawancara.* 9 Januari 2016. [↑](#footnote-ref-116)
117. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jus III*, Beirut: Dar al-Fikr, hal. 187. [↑](#footnote-ref-117)
118. Faisal Ali, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Wawancara,* 21 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-118)
119. Badruzzaman, Ketua majelis adat Aceh, *wawancara,* 21 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-119)
120. Faisal Ali, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Wawancara,* 21 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-120)
121. Sulaiman A. Latief, Imum Mukim Kemukiman Kuta Reuntang, *Wawancara,* 11 Januari 2016. [↑](#footnote-ref-121)
122. Purbayu Budi Santosa, *Larangan Jual Beli Gharar: Tela’ah Terhadap Hadis dari Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Universitas Diponegoro, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, hal. 159. [↑](#footnote-ref-122)
123. Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, *Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar*, Cet. II, Th 1992M, Dar Al-Jail, hal. 164. [↑](#footnote-ref-123)
124. Faisal Ali, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Wawancara,* 21 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-124)
125. Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,* PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal 36. [↑](#footnote-ref-125)
126. Faisal ali, wakil ketua majelis permusyawaratan Ulama, *Wawancara,* 21 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-126)
127. Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah 13,* terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, Penerbit Al-Ma’arif, Bandung, 1987, hal. 31. [↑](#footnote-ref-127)
128. Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah,* UII Press, Yogyakarta, 2001, hal 47. [↑](#footnote-ref-128)
129. Faisal Ali, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Wawancara*, 21 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-129)
130. *Naleh* dalam masyarakat adat Aceh adalah sebutan lain untuk luas tanah sebesar 2500 m2 [↑](#footnote-ref-130)